

297.431  
rus  
v a

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH WANITA  
HAMIL BUKAN DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILINYA DAN  
KEDUDUKAN ANAK YANG DIKANDUNGNYA MENURUT HUKUM  
ISLAM (SUATU STUDI DI KABUPATEN KUDUS)**



**TESIS**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP**

**OLEH :  
ELVI SUSANTI, SH  
B4B 002 090**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
MARET  
2005**

# **TESIS**

## **KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH WANITA HAMIL BUKAN DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILINYA DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DIKANDUNGNYA MENURUT HUKUM ISLAM (SUATU STUDI DI KABUPATEN KUDUS)**

**OLEH :**

**ELVI SUSANTI, SH**

**B4B 002 090**

**Telah Dipertahankan Di depan Dewan Penguji**

**Pada Tanggal 4 Maret 2005**

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

**Menyetujui :**

**Pembimbing**

**Ketua Program  
Magister Kenotariatan**

 **Prof. H. ABDULLAH KELIB, S.H.**

 **MULYADI, S.H., M.S.**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2005

ELVI SUSANTI, SH



Perkawinan yang berhasil adalah yang harus dibangun setiap hari.

Kehidupan perkawinan itu memang banyak cobaannya, tetapi hidup membujang sama sekali tidak ada enaknya.

Minta ampunlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Q.S. An-Nisa : 106)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu
- Kakak dan adik-adikku
- Suami dan anak-anakku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul “KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH WANITA HAMIL BUKAN DENGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILINYA DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DIKANDUNGNYA MENURUT HUKUM ISLAM (SUATU STUDI DI KABUPATEN KUDUS)” ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Di dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas. Namun demikian Penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

## ABSTRAK

Modernitas -di samping bermanfaat- telah banyak membawa korban pelecehan seksual dan kebutuhan biologis lainnya, sebagai akibat menjamurnya pergaulan bebas, *free sex*, dan kumpul kebo yang cenderung semakin marak. Salah satu akibat dari pengaruh kebudayaan asing ini adalah banyaknya dijumpai kasus hamil di luar nikah. Meskipun demikian, kehamilan di luar nikah tersebut bukan untuk hanya didiamkan saja, tetapi harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan segera dilakukannya perkawinan meskipun dalam keadaan perut yang membuncit.

Perkawinan ialah melaksanakan akad (perikatan) yang dijalin pengaturannya kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas dasar keridho'an dan kesukaan kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan hidup berumah- tangga dan untuk menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup) bagi yang lain.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus Kota, 3 orang ulama dan tokoh masyarakat, 10 orang warga masyarakat di mana terdapat wanita hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan, 2 orang wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya yang bersedia menjadi responden tetapi identitasnya dirahasiakan oleh penulis.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus adalah sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat rukun-rukun nikah meskipun perbuatan zina yang sudah dilakukannya adalah perbuatan dosa. Setelah anak yang dikandungnya lahir tidak perlu dilakukan pengulangan nikah lagi karena ijab qobul hanya sekali saja dilakukan. Meskipun pembahasan Al-Qur'an secara langsung dan tegas tidak dikaitkan dengan pernikahan, tetapi tentu saja anak itu harus terlahir sebagai akibat dari pernikahan ayah ibunya yang sah. Kedudukan anak yang dikandung oleh wanita hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah apabila dilahirkan minimal 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya, dan dia memakai nama suami ibunya. Dan apabila anaknya perempuan dan akan menikah maka suami ibunya bisa dijadikan wali nikah. Apabila kurang dari 6 bulan adalah tidak sah, dia memakai nama ibunya, suami ibunya tidak bisa menjadi wali nikah.

Terdapat banyak permasalahan yang timbul terhadap Perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus, dan tentu saja harus mendapatkan tindak lanjut dan dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya oleh para ulama dan tokoh masyarakat.

## ABSTRACT

Modernity –besides usefull- has brought a lot of sexual harrasment victims and any other biological needs, as the result of the free life style extntd, free sex, and living together without marriage which is inclining blaze. One of the consequence of these foreign culture effects is the great number of pregnancy before marriage case which is seen. However, those pregnancies are not kept idle, but have to be concerned and to be followed up by doing the marriage soon although in the situation of swollen stomach.

Marriage is doing commit that is plaited the regulations the both of sides between the man and the woman on the principle of sincerity and the like of the both sides. Because of that a guardian from the woman side in accordance with the characteristic that is secured syara' to allowing live in a family and to make one each other become the couple for another.

The close method that will be use in this research is closing method of judicial and empirical. The research spesification are descriptive analysis. The sample method definition which is use are purposive sampling. The writer take a sample judge of Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, the head of Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kudus, 3 theologians and public figure, 10 person of the public where there are unmarried pregnant woman who are implementing the merriages, 2 unmerried pregnant women who are implementing the marriages not with the man who impregnate her who are willing to be respondence but the identity is secreted by the written. Data collection has been done with primary data and secondary data (interview). The method of data analysis are descriptive analysis.

The marriage that is implementing by pregnant woman not with a man who impregnate her in accordance with Islam law in Kabupaten Kudus is legal wether has complied with marriage pillars requires although adultery behaviour that has been done by her/ him is a sin. After the child that in her womb brought in to the world it is not necessary doing marriage repetition anymore because ajab qobul is just once done. Although the Al-Qur'an explanation directly and fermly is not connected with the marriage, but certainly the cild has to be brpught in to the world as the result of its father and mother marriage legally. The status of the child that is in the womb of the unmerried woman who implementing the marriage in accordance with Islam law is legal when it is born minimally 6 month after it's parents marriage, and it use the name of it's mother husband. And when it is a girl and going to merried, her mother husband can become her guardian. When it is less than 6 month is not legal, she use her mother's name, her mother's husband can not become her guardian.

There are a lot of problems that appears of the marriages that is implemented by preganant woman not with the man who impregnate her in accordance with Islam law in Kabupaten Kudus and certainly has to get follow up and implemented efforts to solve it by theologians and public figures.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Islam.....	19
A.1. Pengertian Islam.....	19
A.2. Pengertian Hukum.....	20
A.3. Hukum Islam .....	20
B. Tinjauan Terhadap Perkawinan.....	27
B.1. Perkawinan Pada Umumnya.....	27
B.2. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	28
B.3. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	29
C. Tujuan Melakukan perkawinan .....	33
D. Asas Perkawinan .....	35
E. Hukum Melakukan Perkawinan.....	35
E.1. Perkawinan Yang Wajib .....	35
E.2. Perkawinan Yang Sunnah.....	36
E.3. Perkawinan Yang Haram .....	37



E.4. Perkawinan Yang Makruh .....	38
E.5. Perkawinan Yang Mubah.....	39
F. Syarat Dan Rukun Perkawinan .....	39
G. Dasar-dasar Umum Tentang Perkawinan.....	42
G.1. Pilihan Yang Baik .....	42
G.2. Beberapa Perempuan Yang Tidak Boleh Dikawin .....	42
G.3. Meminang.....	43
G.4. Ridha .....	44
G.5. Saksi .....	44
G.6. Tidak Membatas Waktu .....	45
G.7. Mahar .....	46
G.8. Kebebasan Memberikan Syarat Dalam Akad Nikah.....	46
G.9. Tanggung Jawab Keluarga Adalah Di Tangan Laki-laki.....	47
H. Kedudukan dan Hak-hak Anak .....	48
H.1. Kedudukan Anak.....	48
H.2. Hak-hak Anak.....	49
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan .....	63
B. Spesifikasi Penelitian .....	64
C. Metode Penentuan Sampel .....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Metode Analisa Data .....	69
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
A.1. Letak Geografi.....	70
A.2. Luas Penggunaan Lahan.....	70
A.3. Wilayah Administrasi.....	71
A.4. Kependudukan.....	72
A.5. Sosial .....	73
B. Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamil Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Menurut Hukum	

Islam Di Kabupaten Kudus .....	75
B.1. Pendapat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kudus ....	89
B.2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus .....	94
B.3. Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kudus .....	98
B.4. Pencatatan Perkawinan Merupakan Suatu Syarat Diakuinya Suatu Perkawinan Oleh Negara .....	101
B.5. Prosedur Pencatatan Perkawinan .....	104
C. Kedudukan Anak Yang Dikandung Oleh Wanita Hamil Yang Melaksanakan Perkawinan Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Kudus .....	116
C.1. Pendapat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kudus ....	123
C.2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus .....	123
C.3. Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kudus .....	124
D. Masalah Yang Timbul Di Masyarakat Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamil Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Di Kabupaten Kudus Dan Peran Peran Para Ulama Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Kudus Dalam Mengatasi Masalah Tersebut .....	128
D.1. Masalah Yang Timbul Di Masyarakat Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamil Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Di Kabupaten Kudus .....	128
D.2. Peran Para Ulama Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Kudus Dalam Mengatasi Masalah Tersebut .....	132
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>147</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini pada umumnya tidak lepas dari pergaulan masyarakat, sebab masing-masing individu saling membutuhkan pertolongan antara satu dan lainnya. Di dalam lingkungan masyarakat kita harus dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan kegiatan perekonomian, kegiatan ibadah, pendidikan, pergaulan dan masih banyak lagi, semuanya itu tentunya tidak dapat kita jalankan seorang sendiri.

Manusia mempunyai kecenderungan fitrawi untuk saling berpasangan, memenuhi kebutuhan biologis secara manusiawi. Karenanya, masalah ini perlu diatur agar tidak mendatangkan malapetaka yang akan menghancurkan kelangsungan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Dewasa ini, pergaulan di masyarakat, khususnya kalangan usia muda semakin bebas. Hal ini sangat berkaitan dengan pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Pergaulan di negara-negara Barat yang begitu bebas pun ikut terbawa masuk ke Indonesia. Pengaruh kebudayaan asing ini masuk ke Indonesia melalui televisi, film-film di bioskop, maupun internet.

---

<sup>1</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri, Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996, ringkasan

Seorang anak mengawali hidupnya dalam suatu sistem sosial yang melingkupi. Di mulai dari keluarga, tetangga, sekolah dan masyarakat sekitar. Lingkungan keluarga yang sehat baik fisik, psikologis maupun sosial memungkinkan anak tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab secara kognitif, emosi maupun sosialnya. Sebaliknya lingkungan keluarga yang tidak kondusif untuk tumbuh secara sehat menyebabkan anggota keluarga khususnya anak menjadi rentan terhadap stimulasi yang merugikan.<sup>2</sup>

Menurut Kohlberg tahap perkembangan moral dimulai saat berusia sekitar enam atau tujuh tahun hingga dewasa muda. Sementara Hurlock membedakan perilaku tak bermoral dengan perilaku amoral. Perilaku tak bermoral ialah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial. Perilaku tak bermoral disebabkan oleh ketidaksetujuan dengan standar sosial, atau kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri. Sedangkan perilaku amoral atau non moral lebih disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan kelompok sosial.<sup>3</sup>

Proses perkembangan moralitas pada anak-anak sehingga menjadi bermoral, tak bermoral atau amoral dipengaruhi oleh berbagai faktor. Prihartanti merangkumkan berbagai faktor yang berpengaruh itu seperti kebiasaan, pengaruh kelompok, motivasi, emosi dan kebingungan, yang akan dijabarkan lebih lanjut seperti di bawah ini :

---

<sup>2</sup> Tim Yayasan Kakak, *Anak-anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 4

<sup>3</sup> Ibid, hal. 17

## 1. Kebiasaan

Kebiasaan juga disebut sebagai *habitual moral reaction*. Setiap orang setiap hari mempelajari bagaimana menghadapi dilema moral sehingga seseorang bereaksi secara otomatis jika menghadapi situasi yang sama. Pengertian *habitual moral reaction* ini mengacu pada teori Bandura tentang *modelling*. Dalam lingkungan keluarga, orang tua diharapkan dapat berperan sebagai model yang baik bagi anak-anak. Begitu pula di sekolah, dalam hal ini guru bertindak sebagai model. Tokoh-tokoh masyarakat atau public figure juga dituntut sebagai model yang pantas ditiru bagi anak yang sedang tumbuh dan berkembang.

## 2. Pengaruh kelompok

Kelompok di sini bisa kelompok keluarga atau kelompok teman sebaya. Jika nilai kelompok berubah, maka tahap perilaku moral juga berubah.

## 3. Motivasi

Perlin menjelaskan tentang pengaruh motivasi dalam perilaku menipu. Dia menemukan tekanan atau tuntutan orang tua untuk sukses. Dan ketakutan gagal akan menimbulkan motivasi untuk berperilaku menipu.

## 4. Emosi

Faktor emosi seperti marah dapat menyebabkan seseorang melanggar peraturan dengan cara pergi meninggalkan rumah tanpa pertimbangan yang masak sebagai bentuk pengalihan rasa marah mereka

yang merasa tertekan oleh sikap otoriter orang tua yang terlalu ketat dan keras.

## 5. Kebingungan

Menurut Hurlock, seseorang yang mengalami kebingungan akan peraturan yang harus diikuti dapat melanggar peraturan tersebut. Kebingungan tersebut dapat pula berupa :

- a. Jika anak harus menerapkan konsep moral yang abstrak pada situasi yang baru
- b. Jika terdapat kesenjangan antara perkataan orang tua dengan perilaku orang dewasa
- c. Jika terdapat kesenjangan antara perilaku tentang konsep baik dan buruk yang dilukiskan media massa dengan yang diajarkan kepada mereka
- d. Jika konsep moral saling bertentangan seperti konsep kejujuran dengan konsep loyalitas, sehingga memunculkan dilema antara membantu teman sebaya atau tidak.<sup>4</sup>

Modernitas - di samping bermanfaat- telah banyak membawa korban pelecehan seksual dan kebutuhan biologis lainnya, sebagai akibat menjamurnya pergaulan bebas, *free sex*, dan kumpul kebo yang cenderung semakin marak. Pernikahan merupakan jalan keluar yang terhormat dalam mengentaskan persoalan ini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 18-21

<sup>5</sup> M. Sujari Dahlan, Op. Cit, ringkasan

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan akhlak harus dapat melandasi dan membekali diri dengan ilmu dan agama, sehingga dalam setiap langkahnya, maupun dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan tidak melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama.

Kurangnya pengetahuan agama seseorang menyebabkan tipisnya keimanan seseorang. Hal itu sangat mempengaruhi terjerumusnya seseorang untuk berbuat hal-hal yang melanggar perintah agama dan norma-norma kesusilaan. Salah satu akibat dari pengaruh kebudayaan asing adalah banyaknya dijumpai kasus kehamilan di luar nikah, yang semakin lama bukannya semakin berkurang tetapi justru semakin banyak.

Nilai agama perlu dipadukan dengan budaya setempat karena ajaran moral yang masih normatif perlu diterjemahkan ke dalam ajaran yang terperinci dan aplikatif, seperti sopan santun/ tata krama yang berlaku di masyarakat. Prinsip sopan santun itu bernilai universal, baik masyarakat primitif maupun modern. Karena itu, untuk menghadapi globalisasi, perlu adanya proteksi terhadap budaya lokal. Menghadapi budaya global paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, menghindari unsur budaya yang negatif dan mengambil yang positif untuk kemaslahatan. Kedua, mengambil teladan dari sejarah dalam menjaga moral bangsa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Suhanjati Sukri, *Budaya Lokal Perlu Diproteksi*, Suara Merdeka, Semarang, 2 Maret 2004, hal. 19

Untuk memenuhi hasrat birahi, manusia memang bisa berbuat apa saja dan di mana saja. Tak peduli lingkungan sekelilingnya yang ramai serta merupakan areal publik. Pergeseran budaya dan pengaruh globalisasi agaknya menjadi titik tolak munculnya fenomena ini. Contohnya saja hubungan intim di dalam mobil, jika dilakukan dengan pasangan resmi, bukanlah kelainan jiwa. Perilaku tersebut hanya sekedar variasi saja. Tetapi lain halnya jika dilakukan oleh para remaja. Perkembangan kota yang sama sekali tidak menyediakan areal publik bagi remaja untuk kencan kemungkinan juga menjadi penyebabnya. Selain itu, faktor ekonomi dan kondisi lingkungan keluarga serta pergaulan juga turut berperan untuk menciptakan hal-hal tersebut.<sup>7</sup>

Kasus kehamilan di luar nikah tidak saja banyak dijumpai pada lingkungan masyarakat yang tinggal di kota-kota besar saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil, bahkan sudah merambah ke lingkungan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dengan demikian berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan norma-norma kesusilaan sudah terjadi di mana-mana. Hamil di luar nikah adalah hasil dari perbuatan zina, hukumnya haram dan berdosa. Tetapi meskipun demikian, kehamilan di luar nikah tersebut bukan untuk hanya didiamkan saja, sehingga nantinya anak yang dikandungnya pun akan lahir di luar pernikahan, tanpa adanya ayah yang mengakui, tetapi harus disikapi dan

---

<sup>7</sup> Arixc Ardana, *Mengintip Fenomena Mobil Goyang*, Seputar Semarang, Edisi 32 Tahun I, Semarang, 23-29 Maret 2004, hal. 20



ditindaklanjuti dengan segera dilakukannya perkawinan meskipun dalam keadaan perut yang membuncit, sehingga anak yang dikandungnya nanti terlahir dalam keadaan mempunyai ayah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana status keabsahan anaknya itu. Bukankan jika “kebiasaan yang salah” semacam ini ditolelir akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi “kesucian” lembaga pernikahan yang oleh Al-Qur’an disebut sebagai “*misaaan ghalidhan*” atau “perjanjian yang kokoh” dan suci, sebagai wasilah untuk mendapat keturunan yang saleh dan salehah.<sup>8</sup>

Implikasi yang tampaknya sudah banyak muncul adalah seperti contoh-contoh yang disebutkan di atas. Karena restriksi tidak lagi ditempatkan sebagai rambu moral yang proporsional dan malahan ada kecenderungan makin longgar, maka bisa jadi hubungan muda mudi berjalan permisif. Hubungan seksual pra nikah kian menjadi “kebiasaan salah” yang dianggap “biasa”, karena mereka memiliki “acuan” bahwa toh pada akhirnya akan kawin juga, dan anak yang dilahirkan pun diakui sebagai anak sah, karena lahir dalam perkawinan yang sah. Ini karena Al-Qur’an mentolelir perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berzina (QS an-Nur 24 : 3).<sup>9</sup>

Menurut kodratnya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mempunyai daya atau rasa untuk saling tertarik antara satu dan lainnya, sehingga mereka ini berkeinginan untuk hidup bersama. Di dalam

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid, hal. 13

manusia hidup bersama dilandasi oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan akan menjadikan mereka sebagai suatu keluarga, yang mencoba untuk hidup mandiri, yaitu lepas dari keluarga asal maupun mandiri di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, yang artinya :

“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa ternteram kepadanya.”

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>11</sup>

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan

---

<sup>10</sup> Jihad Rokhimiyati, *Tinjauan Tentang Prosedur Perkawinan di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dengan Dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam*, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 1

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 1

pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan Bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang sudah berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan Bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.<sup>13</sup>

Walaupun Bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih berlaku adat dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda. Kita masih melihat berlakunya tata-tertib perkawinan bagi masyarakat yang bersendi keibuan (Minangkabau), tata-tertib perkawinan

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

bagi masyarakat yang bersendi kebapakan (Batak), atau bersendi keorangtuaan (Jawa), dan sudah banyak pula yang sifatnya campuran. Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu-Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan hukum perkawinan menurut adat Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan karya seseorang dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam rumah tangga yang ideal berlaku filsafat “suka sama suka”. Jika filsafat ini dijadikan landasan utama, ia akan murni selalu dan dapat menjamin kehidupan yang beruntung serta bahagia sepenuhnya. “suka sama suka” tidaklah memilih tempat dan waktu tidaklah ia memilih materi dan moril, akan tetapi ia berdiri sendiri di atas puncak yang tinggi sekali. Karena itu Islam mengajarkan kepada orang yang ingin melakukan perkawinan, seharusnya kedua belah pihak menanamkan rasa “suka sama suka” terlebih dahulu. “Suka sama suka” yang datang dari lubuk hati dan jiwa raga yang murni.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan bahwa lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama dan negara. Perkawinan dan perceraian adalah persoalan yang sangat erat dengan hakikat kemanusiaan, sangat menyentuh hati nurani setiap orang yang

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 2

<sup>15</sup> Tamar Djaja, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, hal. 41

berbudaya. Itulah sebabnya adanya undang-undang yang mengatur hal itu merupakan satu hal yang tidak boleh tidak, satu *conditio sine qua non*. Begitulah, maka Undang-undang Perkawinan merupakan produk legislatif yang kehadirannya sangat ditunggu semua orang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan wujud realisasi cita-cita Bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan perkawinan yang bersifat nasional.<sup>16</sup>

Tetapi, tiada suatu peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek dari pada perkembangan hukum. Di lain pihak adalah suatu tantangan terhadap hukum bagaimana ia dapat menjangkau masa depan. Hal ini merupakan suatu yang sangat ideal, namun karena hukum pada akhirnya menyangkut manusia yang sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan.<sup>17</sup>

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Pasal 42 undang-undang ini menyatakan :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

---

<sup>16</sup> Yunanto, *Pranata Perkawinan Dalam Masyarakat Yang Pluralistik*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Nomor 2, FH UNDIP, Semarang, 1997, hal. 7

<sup>17</sup> Ibid

Pada tahun 1991, Presiden mengeluarkan instruksinya Nomor 1 Tahun 1991 yang isinya agar *pertama*, Menteri Agama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang terdiri atas : a). Buku I tentang Hukum Perkawinan; b). Buku II tentang Hukum Kewarisan; c). Buku III tentang Perwakafan, sebagai telah diterima dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988 untuk digunakan instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 99 KHI dinyatakan : “Anak yang sah adalah : a). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Sebenarnya jika dicermati klausul Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meskipun dicoba dijelaskan oleh klausul Pasal 43 Ayat 1 : anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Pasal 44 menyatakan :

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Terhadap persoalan ini, sebenarnya aturan sudah memberikan rambu bahwa batas minimal usia kandungan adalah 6 (enam) bulan, terhitung dari akad nikah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf, 46 : 15 disebutkan :

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 10

“.....mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun)”

Dan Al-Qur'an Surat Lukman, 31 : 14 yang menyatakan :

“.....ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan)...”

sudah barang tentu ini harus dipahami dalam konteks waktu, di mana pada umumnya ibu yang melahirkan akan menyusukannya selama dua tahun.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur, 24 : 3 tidak disinggung soal keabsahan anak. Tetapi persoalan kemudian muncul, bagaimana sekiranya yang terjadi jika seorang wanita hamil, ternyata laki-laki yang mengawininya bukanlah laki-laki yang menzinai/ menghamilinya ? sementara secara teknis, pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama yang melakukan pemeriksaan administratif dan persyaratan nikah sebelum akad nikah dilaksanakan, menghadapi kendala psikologis dan hukum, ketika harus bertanya “apakah calon mempelai wanita sudah hamil” sementara boleh jadi secara fisik sudah melihat indikasi adanya kehamilan itu. Selain mengganggu privasi seseorang, juga secara tidak langsung melakukan tuduhan, yang besar kemungkinan dapat terjebak ke dalam praktek *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina)

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk memilih judul tesis “Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamil Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Dan Kedudukan Anak Yang Dikandungnya Menurut Hukum Islam (Suatu Studi Di Kabupaten Kudus)”. Pengambilan judul tersebut didasarkan pada keinginan penulis

untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam, masalah-masalah yang timbul di masyarakat terhadap hal tersebut, serta peran para ulama dan tokoh masyarakat dalam mengatasi hal tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan mengenai “Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamil Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Dan Kedudukan Anak Yang Dikandungnya Menurut Hukum Islam (Suatu Studi Di Kabupaten Kudus)”.

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak yang dikandung oleh wanita hamil yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus ?
3. Masalah apakah yang timbul dalam masyarakat terhadap dilaksanakannya perkawinan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan bagaimanakah peran para ulama serta tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus.
2. Untuk memahami kedudukan anak yang dikandung oleh wanita hamil yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Islam di Kabupaten Kudus.
3. Untuk memahami tentang masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat terhadap perkawinan yang dilaksanakan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan peran para ulama serta tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Akademis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk menguji kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, selanjutnya dapat dikembangkan guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum perkawinan Islam, khususnya mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam.

## **2. Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang beragama Islam sehingga dapat mengurangi masalah yang timbul di masyarakat dengan dilaksanakannya perkawinan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar atau landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan perkawinan, khususnya mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya.

## **E. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini dibuat landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan., meliputi : Tinjauan Tentang Hukum Islam, Pengertian Islam, Pengertian Hukum, Hukum Islam, Pengertian Perkawinan, Perkawinan Pada Umumnya, Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Menurut Hukum Islam, Tujuan

Perkawinan, Asas Perkawinan, Hukum Melakukan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Dasar-dasar Umum Tentang Perkawinan, Pilihan Yang Baik, Beberapa Perempuan Yang Tidak Boleh Dikawin, Meminang, Ridha, Saksi, Tidak Membatas Waktu, Mahar, Kebebasan Memberikan Syarat Dalam Akad Nikah, Tanggung Jawab Keluarga Adalah Di Tangan Laki-laki, Kedudukan Dan Hak-hak Anak, Kedudukan Anak, Hak-hak Anak.

### BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

### BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan survey lapangan yang telah dianalisis. Pembahasan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan survey lapangan berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang ada, meliputi : keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus, kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam, masalah yang timbul dalam masyarakat terhadap perkawinan yang dilaksanakan wanita hamil bukan dengan laki-laki

yang menghamilinya, dan peran para ulama serta tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil studi pustaka dan survei lapangan serta pembahasan, dan penulis akan memberikan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang dipergunakan orang untuk menyebut Hukum Islam, diantaranya ialah : fikih, fikih Islam, syari'ah (syari'at), syari'at Islam dan sebagainya, yang sebenarnya istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda-beda.

##### A.1. Pengertian Islam

Hukum Islam itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu sebelum mengemukakan pengertian Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian Islam.

Perkataan Islam berasal dari kata benda dalam Bahasa Arab (*masdar*) yang berasal dari kata kerja (*fi'il Madli*) *salima*. Akarnya adalah *sin-lam-mim*. Dari akar itu terbentuk kata *salm*, *silm* dan sebagainya. Arti yang terkandung dalam perkataan Islam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut di atas, timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, yang artinya semoga anda selamat sejahtera.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Agama Islam Di Indonesia*, Catatan Kuliah, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 15

## **A.2. Pengertian Hukum**

Di antara para sarjana tidak ada kesepakatan mengenai definisi hukum karena masing-masing sarjana tersebut memberikan definisinya dengan melihat dari sudut yang berlainan.

Hazairin bahkan tidak menggunakan definisi dalam menjelaskan hukum, akan tetapi hanya memberikan perincian isinya yang terdiri dari 3 (tiga) perkara, yaitu : pertama kewenangan, kedua kewajiban dan hak imbalannya, dan ketiga larangan.<sup>20</sup>

Sedangkan Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam peraturan kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>21</sup>

## **A.3. Hukum Islam**

Pengertian hukum tidak selalu dapat didefinisikan secara tuntas. Demikian pula halnya dengan Hukum Islam, para sarjana memberikan definisinya berbeda-beda.

Mohammad Muslehuddin memberikan definisi Hukum Islam sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 52-53

<sup>21</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Majalah Mimbar Hukum Nomor 9 Tahun IV, Jakarta, 1992, hal. 45-46

Hukum Islam atau syari'ah menurut Teori Klasik adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam merupakan Sistem Ketuhanan yang mendahului Negara Islam dan tidak dahului olehnya.<sup>22</sup>

Abdul Mutholib memberikan pendapatnya mengenai pengertian Hukum Islam sebagai berikut :

Hakekat Hukum Islam ialah Hukum Agama, Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari Agama Islam. Hukum Islam ialah Hukum Samawi, artinya Hukum Agama yang menerima wahyu, yaitu Kitab Suci Al-Qur'an, Hukum Islam mengatur hubungan pribadi, masyarakat, negara dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sedangkan Mohammad Daud Ali memberikan definisi bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam.<sup>23</sup> Mengenai Agama Islam, beliau juga mempunyai kerangka dasar yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu : akidah, syari'ah dan akhlak. Dari ketiga bidang tersebut kemudian muncul ilmu-ilmu keislaman sebagai hasil pemikiran manusia. Dari bidang akidah antara lain muncul *Ilmu Kalam* atau *Ushuluddin*, dari bidang syari'ah muncul *Ilmu Fikih*, dan dari bidang akhlak muncul *Ilmu Tasawuf* dan *Ilmu Akhlak*. Sebagai hasil penalaran manusia, konsekuensinya adalah dalam ilmu-ilmu tersebut kemungkinan adanya pengembangan dan perbedaan pendapat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mohammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientasi Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam (Philosophy Of Islamic Law And The Orientalist A Comparative Study Of Islamic Legal System)*, terjemahan Wahyudi Asmin, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hal. 45

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 45

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, *Agama Islam Di Indonesia*, Op. Cit, hal. 26

Hukum Islam sebagai sistem hukum menurut beliau juga mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu : hukum, *hukm* dan *ahkam*, *syari'ah* atau *syari'at*, dan *fikih*, serta beberapa istilah lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>25</sup>

a. Hukum

Pengertian hukum secara sederhana sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis seperti Hukum Adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti Hukum Barat. Melalui Asas Konkordansi sejak pertengahan abad XIX Hukum Barat tersebut berlaku di Indonesia.

Hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti Hukum Barat itu sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam suatu masyarakat tertentu mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan Hukum Islam yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT

---

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit



dan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, melainkan juga mengatur hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

b. *Hukm dan Ahkam*

Perkataan hukm sebagaimana tersebut di atas adalah berasal dari Bahasa Arab *hukm* dalam bentuk tunggal (*mufrad*), bentuk jamaknya *ahkam* yang berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan atau pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia menurut sistem Hukum Islam ada 5 (lima) yang disebut *al-akham al-khamsah* (penggolongan hukum yang lima), yaitu :

- (1) jaiz atau mubah, artinya kebolehan, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan
- (2) sunnat, yaitu anjuran untuk melakukan sesuatu perbuatan
- (3) makruh, yaitu anjuran untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan
- (4) wajib, yaitu keharusan untuk melakukan sesuatu
- (5) haram, yaitu larangan untuk melakukan sesuatu.

Dengan adanya penggolongan hukum yang lima tersebut, maka setiap perbuatan dan keadaan dalam Hukum Islam dapat ditentukan hukumnya. Perbuatan atau keadaan itu ditempatkan dalam salah satu penggolongan hukum tersebut.<sup>26</sup>

c. Syari'at

Menurut bahasa, syari'at berarti jalan, jalan yang lempang, jalan ke mata air, jalan yang harus dituruti. Sedang menurut istilah ada beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana, antara lain :

Hasbi ash Shiddieqy mengatakan bahwa syari'at ialah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasul-Nya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliyah atau berpautan dengan aqidah dan akhlak.<sup>27</sup>

Abdullah Siddik mengatakan bahwa syari'at ialah dasar-dasar hukum yang mengatur seorang muslim dalam kehidupannya, dasar-dasar mana kita dapati di dalam Al-Qur'anul Karim.<sup>28</sup>

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa syari'at ialah susunan, peraturan dan ketentuan yang disyari'atkan Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia

---

<sup>26</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kehuargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 16

<sup>27</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hal. 9

<sup>28</sup> Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, Widjaja, Jakarta, 1982, hal. 181

mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia serta hubungannya dengan alam besar dan kehidupan.<sup>29</sup>

Mohammad Daud Ali melihat dari segi Ilmu Hukum, syari'at merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.<sup>30</sup> Dasar-dasar hukum tersebut termuat di dalam Kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Al Hadist). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist itu sebagian besar masih bersifat umum sehingga memerlukan perincian lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Untuk ini kemudian muncul satu bidang ilmu tersendiri yang disebut *Ilmu Fikih*.

#### d. Fikih

Fikih menurut pengertian bahasa berarti faham atau pengertian, memahami sesuatu secara mendalam, faham terhadap

---

<sup>29</sup> Mahmud Syaltut, *Aqidah Dan Syari'ah Islam (Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah)*, terjemahan Fachruddin HS, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. XIII

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 49

pembicaraan orang. Menurut istilah (terminologi), ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam.

Ahmad Hanafi mengutip pendapat Al-Jurjani memberikan definisi sebagai berikut :

Fikih ialah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh fikiran (*ra'yu*) serta penelitian (*ijtihad*) dan memerlukan penalaran dan pengkajian.<sup>31</sup>

Hazairin mengatakan bahwa fikih ialah pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk hidup selainnya dan dengan segala macam benda, sekedar pemikiran itu melahirkan sesuatu norma (*hukm*).<sup>32</sup>

Perkataan fikih menurut Mohammad Daud Ali jika dihubungkan dengan perkataan ilmu, maka dapat dirumuskan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab Hadist. Dengan kata lain, Ilmu Fikih selain rumusan di atas adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang

---

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 10

<sup>32</sup> Hazairin, *Hadist Kewarisan Dan Sistem Bilateral*, Tinta Mas, Jakarta, 1967, hal. 2

telah dewasa dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan Hukum Islam (*mukallaf*).<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Terhadap Perkawinan**

### **B.1. Perkawinan Pada Umumnya**

Sudah menjadi kodrat alam jika antara laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan. Segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat Ayat 49, yang artinya :

“Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu dapat mengambil peringatan.”<sup>34</sup>

Oleh karena dua jenis laki-laki dan perempuan ini saling mempunyai daya tarik maka mereka juga secara naluriah mempunyai hasrat untuk saling mengadakan kontak. Sehingga Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual dan diwujudkan dalam suatu bentuk perkawinan.

Ada beberapa hal yang menjadi pendorong manusia untuk melakukan suatu perkawinan, yaitu :

- a. Untuk meneruskan keturunannya
- b. Untuk memperoleh ketenangan lahir maupun batin.

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit, hal. 51

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ajaran Islam Tentang Sex Education, Hidup Perkawinan, dan Pendidikan Anak*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal. 9

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 3, yang artinya :

“Hendaklah kamu nikahi yang baik bagimu di antara wanita.”<sup>35</sup>  
Rasulullah menganjurkan berkawin dengan sabdanya, yang

artinya :

“Hai sekalian pemuda, siapa yang sanggup bersetubuh, (karena ada belanja perkawinan), hendaklah berkawin, karena berkawin itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang tidak sanggup berkawin, hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu mengurangi keinginan syahwat.”<sup>36</sup>

Di dalam menentukan calon pasangan hidupnya, baik calon suami atau calon isteri tidak dapat memilih secara sembarangan. Orang tua kadang menentukan kriteria dari calon menantunya itu. Falsafah Jawa memberikan pedoman dalam mencari jodoh, yaitu : “Bobot, Bibit, Bebet”. “Bobot” berarti orang yang berbudi pekerti baik. “Bibit” berarti dari keturunan orang baik-baik, dalam arti baik sifatnya, adat kelakuannya maupun pribadinya. “Bebet” berarti kalau perempuan suci, sedang kalau laki-laki ialah yang gagah dalam arti berani bertanggung jawab. Dengan demikian baik “Bobot, Bibit, Bebet” adalah dalam arti psikis, bukan phisiknya.<sup>37</sup>

## **B.2. Perkawinan Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974**

Di dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

---

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal. 2

<sup>36</sup> Ibid, hal. 5

<sup>37</sup> Jihad Rokhimiyati, Op. Cit, hal. 11

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian lahir batin dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ialah bahwa batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Setiap kebahagiaan dalam perkawinan merupakan titik pangkal suksesnya perkawinan itu, agar kebahagiaan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diwujudkan oleh suami isteri maka langkah ke arah itu harus dimulai dari awal mereka bersatu yaitu perkawinan sejak mulai berrumah-tangga, agama sebagai dasar hidup suami isteri itu pula harus sama.<sup>38</sup>

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.<sup>39</sup>

### **B.3. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan*

---

<sup>38</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal. 14

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 8

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>40</sup>

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berrumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>41</sup>

Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo’a, sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istreri serta anggota keluarga

---

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 4

<sup>41</sup> Ibid, hal. 10



berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berrumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir batin.<sup>42</sup>

Perkawinan ialah melaksanakan akad (perikatan) yang dijalin pengaturannya kedua belah pihak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridho'an dan kesukaan kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan hidup berrumah- tangga dan untuk menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup) bagi yang lain.<sup>43</sup>

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara/ dan yang membatasi hak dan kewajiban dari/ serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>44</sup>

Perkawinan di dalam Islam disebut dengan nikah. Dalam hal ini perlu dibedakan antara nikah menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian istilah.

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 11

<sup>43</sup> Hasbi Ash Shidieqi, *Al-Islam, Cetakan III*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 246

<sup>44</sup> Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1968, hal. 10

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul dan bersetubuh, dan pengertian menurut syara' ialah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan lafads.<sup>45</sup>

Maksud dari pengertian tersebut ialah kalau laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk berrumah-tangga, hendaklah kedua calon suami isteri itu melakukan akad nikah terlebih dahulu hal mana kita jumpai dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32, yang artinya :

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>46</sup>

Nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.<sup>47</sup>

Inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Tidak ada nikah (perkawinan) bila mana tidak ada hubungan seksual. Bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Op. Cit

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita IV/ Tahun II/ 1985/ 1986, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal 549

<sup>47</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, 1971, hal. 65

<sup>48</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta, 1961, hal. 1

Dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarganya, yang diliputi rasa tenteram serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>49</sup>

### C. Tujuan Melakukan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang teratur.<sup>50</sup>

Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>51</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat hidup tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta

---

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14

<sup>50</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al-Hidayah, Jakarta, 1964, hal. 1

<sup>51</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 12

dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>52</sup>

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada 5 (lima) hal, sebagai berikut :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana di atas tidak berbeda.

---

<sup>52</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 1982, hal. 10

#### **D. Asas Perkawinan**

Dalam membicarakan perkawinan menurut Hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan
2. Asas selektivitas, adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah
3. Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.<sup>53</sup>

#### **E. Hukum Melakukan Perkawinan**

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, namun apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

##### **E.1. Perkawinan Yang Wajib**

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

---

<sup>53</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, hal. 34

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin. Bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi karena adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya.

## **E.2. Perkawinan Yang Sunnah**

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunnah.

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat

bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin.

### **E.3. Perkawinan Yang Haram**

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya.

Hadist Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (mas kawin) untuk isterinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak isteri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan tentang keadaannya itu kepada calon isteri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak isterinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan. Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon isteri harus memberi keterangan kepada calon isteri agar pihak isteri tidak akan merasa tertipu.

Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting bagi sukses atau gagalnya hidup perkawinan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami oleh calon

suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak isteri merasa tertipu.<sup>54</sup>

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu juga berlaku bagi calon isteri. Calon isteri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu.

#### **E.4. Perkawinan Yang Makruh**

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat akan menyusahkan pihak isteri, misalnya, calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>54</sup> Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Dar al-Kutub, Kairo, 1965



### **E.5. Perkawinan yang Mubah**

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tiak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekadar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah sebab tidak ada nas Al-Qur'an atau sunnah Rasul yang melarangnya.<sup>55</sup>

### **F. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Sebelum masuk pada rukun dan syarat perkawinan, terlebih dahulu kita lihat mengenai dasar berlakunya perkawinan menurut Hukum Islam khusus mengenai Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, sekarang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan,

---

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Op. Cit, hal. 14-16

talak dan rujuk tentulah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ini terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Q. II Ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Surat Al-Maidah Ayat 5 (Q. V : 5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Surat An-Nisa' Ayat 22, 23 dan 24.

b. Syarat khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan

2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat rohani maupun jasmani

- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan

- d. Harus ada wali nikah

- e. Harus ada 2 (dua) orang saksi, Islam, dewasa dan adil

- f. Membayar mahar

- g. Sebagai proses akhir dan lanjutan dari Akad Nikah adalah pernyataan Ijab dan Qabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, hal. 49-54

## **G. Dasar-dasar Umum Tentang Perkawinan**

### **G.1. Pilihan Yang Baik**

Islam memberikan petunjuk kepada masing-masing calon suami isteri untuk memilih pasangannya atas dasar-dasar yang abadi, yang tidak akan hanyut, yaitu agama dan akhlak. Selain kedua hal tersebut, missalnya harta, kecantikan, atau nasab bisa hilang. Pilihan yang kurang baik tidak akan bisa membawa ketentraman hati dan tidak akan dapat mendatangkan cinta dan kasih sayang antara suami isteri.

Dengan pilihan yang baik oleh masing-masing suami isteri itu, maka kehidupan perkawinan akan berlangsung dengan cinta kasih dan bahagia. Dan untuk anak-anak, perkawinan seperti ini akan menghasilkan pendidikan yang baik pula, sebab generasi baru yang berada dalam rumah yang penuh dengan pertentangan, perselisihan dan tidak adanya saling pengertian antara suami isteri, tidak akan menjadi kuat.<sup>57</sup>

### **G.2. Beberapa Perempuan Yang Tidak Boleh Dikawini**

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 22-24 disebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikah laki-laki, yang dapat dibagi dua :

1. Haram dinikah untuk selamanya, karena :

- a. Karena hubungan nasab : ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi, kemenakan perempuan.

---

<sup>57</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal. 23-24

- b. Karena hubungan susuan : ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, saudara perempuan susuan.
- c. Karena hubungan semenda : mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri.
- d. Karena sumpah li'an.

2. Haram dinikah untuk sementara, karena :

- a. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi isteri seseorang.
- b. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
- c. Perempuan sedang dalam menjalani masa iddah.
- d. Perempuan yang ditalak tiga kali.
- e. Perkawinan orang yang sedang ihram.
- f. Kawin dengan pezina.
- g. Mengawini wanita musyrik.
- h. Kawin dengan lebih dari empat isteri.<sup>58</sup>

### G.3. Meminang

Melihat akan kesucian dan pentingnya akad nikah, maka syara' telah menetapkan perlu adanya suatu pendahuluan yang disebut meminang dengan segala ketentuan-ketentuannya. Laki-laki yang hendak meminang diperkenankan dan dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dipinangnya, dan begitu pula sebaliknya, supaya kedua belah pihak dapat mengenalnya dari dekat, sepanjang ketentuan syara'.

---

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hal. 31-36

Tidak semua wanita boleh dipinang seketika. Wanita boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat :

- a. Tidak terdapat halangan-halangan syara' untuk dikawini seketika oleh laki-laki yang meminang karena tidak ada hubungan mahram, tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang menjalani iddah talak *raj'i*
- b. Tidak sedang dalam peminangan laki-laki lain.<sup>59</sup>

#### **G.4. Ridho**

Perkawinan yang juga dikenal sebagai ikatan hidup itu harus tumbuh dari kemauan dan kerelaan yang sesungguhnya yang keluar dari hati masing-masing suami isteri, karena itu tidak ada sedikitpun hak paksa seseorang untuk mengawini orang yang tidak mencintainya, dan tidak ada kekuasaan kepala keluarga atas sebagian anggotanya untuk harus kawin. Karenanya kalau seorang laki-laki sudah dewasa, dia mempunyai hak kawin dengan perempuan yang disukainya. Begitu juga si gadis yang sudah dewasa.<sup>60</sup>

#### **G.5. Saksi**

Islam mewajibkan adanya saksi dalam perkawinan, ini adalah karena besarnya persoalan akad nikah itu. Nabi Muhammad, SAW bersabda :

“Tidak ada perkawinan melainkan dengan saksi.”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 19

<sup>60</sup> Mu'ammal Hamidy, Op. Cit, hal. 28

<sup>61</sup> Ibid, hal. 30-31

Secara ringkas, syarat-syarat saksi adalah :

- a. Adil (ini masih diperselisihkan oleh para ulama)
- b. Berakal sehat
- c. Baligh
- d. Muslim (bagi perkawinan muslim/ muslimah)
- e. Kedua saksi dapat mendengarkan ucapan ijab kabul dan memahami maksudnya.<sup>62</sup>

#### **G.6. Tidak Membatas Waktu**

Perkawinan disyari'atkan supaya merupakan perkawinan yang abadi untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial dan maksud yang idealis bagi ketentraman jiwa dan pendidikan anak-anak serta kerja sama yang harmonis antara suami isteri. Oleh karena itu, setiap pembatasan waktu tidak akan pernah bisa mencapai tujuan-tujuan ini, karena tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk melampiaskan syahwat dan bersenang-senang sementara.<sup>63</sup>

Perkawinan disyari'atkan supaya merupakan perikatan yang abadi. Sedang adanya perceraian (thalak) adalah masalah mendatang yang tidak ada hubungannya dengan mengadakan perkawinan itu sendiri. Itulah sebabnya, maka pembatasan waktu dalam perikatan ini akan merusak perkawinan itu sendiri karena berarti meniadakan perikatan.

---

<sup>62</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri, Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996, hal. 28-29

<sup>63</sup> Mu'ammal Hamidy, Op. Cit, hal. 31-32

Perkawinan sementara tidak akan dapat menumbuhkan ketentraman, cinta dan kasih sayang.

#### **G.7. Mahar**

Demi mengangkat derajat wanita, maka mahar tidak dijadikan sebagai harga bagi wanita. Al-Qur'an menjadikan mahar sebagai hadiah yang harus disampaikan oleh seorang suami kepada isterinya, sebagai lambang penghargaan dan penghormatan kepada isteri. Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 4 menyebutkan bahwa :

“Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka, sebagai satu kewajiban atas (suami).”

Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda :

“Berilah (isterimu itu ) sekalipun hanya dengan sepotong cincin dari besi. (HR Bukhari, Muslim, dll).”

Ini semua dimaksudkan untuk memudahkan persoalan perkawinan, sebagai peletakan batu pertama bagi pembangunan masyarakat. Dan supaya mahar itu tidak lagi merupakan batu penghalang bagi pemuda yang hendak melakukan perkawinannya, yang banyak membawa hancurnya masyarakat dan mengancam existensinya yang agung itu.<sup>64</sup>

#### **G.8. Kebebasan Memberikan Syarat Dalam Akad Nikah**

Dalam akad perkawinan, masing-masing dari suami isteri diperkenankan mengajukan persyaratan apa saja yang mereka sukai, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Masing-masing

---

<sup>64</sup> Ibid, hal. 32-33



harus memenuhi janjinya karena kerelaan dalam melaksanakan akad nikah dinilai telah sempurna apabila persyaratan yang diajukan itu telah disepakati bersama, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji (mu itu).”<sup>65</sup>

#### **G.9. Tanggung Jawab Keluarga Adalah Di Tangan Laki-laki**

Suami isteri harus bekerja sama dalam mengatur urusan rumah tangganya. Karena itu kedua belah pihak harus mengadakan tukar pandangan tentang apa yang menjadi kewajibannya, tanpa menodai kepribadian yang lain, dalam batas-batas permusyawaratan. Kalau sudah dicapai kesepakatan maka kedua belah pihak harus melaksanakannya. Akan tetapi kehidupan yang panjang seperti halnya kehidupan bersuami isteri ini, satu hal yang mungkin tidak akan dicapai kesepakatan dalam satu-satu persoalan. Oleh karena itu harus ada seseorang yang dipandang sebagai bertanggung-jawab. Sebab kalau tidak demikian, akan terjadilah krisis kepemimpinan dan hancurlah rumah tangga.

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan suami, sesudah terlebih dahulu mempersamakan hak-hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34, yang artinya :

---

<sup>65</sup> Ibid, hal. 34

“Laki-laki adalah pengurus bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagiannya, dan karena laki-laki itu telah memberikan nafaqah dengan harta-harta mereka.”

Kepengurusan laki-laki dalam rumah tangga ini tidak setingkat dengan kepala, sebab dalam rumah tangga itu tidak ada kepala dan rakyat. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban dan kekuasaan yang berada di tangan masing-masing suami isteri. Oleh karena itu, laki-laki sesuai dengan tabiatnya, adalah penanggung jawab pertama bagi kehidupan rumah tangga yang diikuti dengan kewajiban yang berhubungan dengan harta benda.

Karena itu, suamilah yang harus memberikan mahar dan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya serta pengamanan rumah.<sup>66</sup>

## **H. Kedudukan Dan Hak-hak Anak**

### **H.1. Kedudukan Anak Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari rumusan tersebut ada dua kemungkinan sahnyanya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah sebab Hukum Islam pun menentukan demikian. Namun pada kemungkinan pertama, hanya

---

<sup>66</sup> Ibid, hal. 34-36

dipandang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

Dalam hal ketentuan bagian pertama Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, dapat dipastikan bahwa ketentuan undang-undang ini tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam.<sup>67</sup>

## **H.2. Hak-hak Anak**

### **a. Hak nasab**

Hak-hak anak yang terpenting terhadap ayah adalah kepastiannya dalam soal nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu bapaknya. Nasab ini terjadi karena beberapa jalan, yaitu :

#### **1. Karena perkawinan**

Perkawinan adalah merupakan jalan yang dibenarkan untuk menetapkan nasab apabila syarat-syarat kehamilan perempuan itu telah terpenuhi, yaitu si anak tersebut dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini Islam telah memberikan batas minimal, yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari perkawinan yang sah. Hal ini

---

<sup>67</sup> Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hal. 107

didasarkan atas firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang artinya :

“Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang mau menyempurnakan penyusuan.”

Dan berfirman pula Allah SWT dalam Surat Al-Akhqaaf Ayat 15, yang artinya :

“Mengandung dan menyapihkan adalah tiga puluh bulan”.

Ayat pertama memberikan batas menyusui selama 2 (dua) tahun, dan ayat kedua membatasi diri masa hamil sampai menyapih selama 2,5 (dua setengah) tahun. Dengan demikian, maka masa hamilnya itu adalah 6 (enam) bulan.

Adapun batas maksimalnya, para ahli fiqh Ja’fariyah berpendapat antara 9 (sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal perkawinan yang sah.<sup>68</sup>

## 2. Karena pengakuan

Karena keinginan Islam untuk menetapkan nasab yang sebenarnya, maka Islam memberikan hak kepada ayah untuk mengakui terhadap seorang anak kecil berdasar ketetapan sebelumnya, bukan karena hubungan di luar nikah (zina). Bahkan mungkin dia telah kawin dan menyembunyikan perkawinannya itu, kemudian ia ingin mengakui, bahwa si anak kecil itu adalah anaknya sendiri, sesudah

---

<sup>68</sup> Mu’ammal Hamidy, Op. Cit, hal. 143-144

sekian lama tidak diakuinya. Namun untuk pengakuan ini diperlukan beberapa syarat.

Ahli-ahli fiqh berpendapat, bahwa pengakuan itu ada dua macam, yaitu :

- a. Pengakuan yang ditanggungkan kepada orang lain, misalnya orang berkata : “ini saudaraku”. Pengakuan nasab seperti ini perlu dengan bukti atau menetapkan ayahnya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan masalah harta benda, maka dia dianggap bersekutu dalam harta yang diwarisi dari ayahnya, apabila ayah tidak mengakuinya, atau jika ahli-ahli waris yang lain tidak sepakat.
- b. Pengakuan yang ditanggungkan kepada diri orang yang mengaku, misalnya dia mengatakan : “ini anakku”. Dalam hal ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  1. Bahwa orang yang mengakuinya itu memang melahirkan anak, supaya tidak tampak kedustaannya, yaitu perbedaan umur antara keduanya itu memang memungkinkan. Adapun kalau perbedaan umur antara keduanya itu dirasa tidak memungkinkan, maka pengakuannya itu dianggap tidak bernilai. Misalnya seseorang yang umurnya 30 tahun mengakui anak yang umurnya 40 tahun. Jelas pengakuannya ini adalah dusta belaka.

2. Anak yang diakuinya tidak diketahui nasabnya, yakni nasab si anak tersebut tidak dari ayahnya sebab nasab tidak dapat menerima *fasakh* (pembatalan dengan melalui pengaduan kepada Pengadilan Agama) dan tidak boleh berlepas diri dari seseorang dengan menisbatkan kepada orang lain.
3. Anak yang diakuinya itu harus membenarkan terhadap pengakuan tersebut, kecuali apabila si anak masih kecil atau kehilangan tanggung jawab, misalnya karena gila, di mana orang tersebut omongan tidak dianggap. Adapun apabila anak yang diakuinya itu sudah dewasa atau lebih dari dewasa, kemudian dia mendustakan terhadap pengakuannya itu, maka pengakuan tersebut dianggap batal.

Dengan persyaratan-persyaratan dan ikatan-ikatan tersebut, maka kita dapat mengetahui beberapa perbedaan prinsipil antara pengakuan nasab untuk membetulkan kekeliruan yang terdahulu dan antara mengambil anak angkat yang secara mutlak tidak dibenarkan oleh agama Islam.<sup>69</sup>

### 3. Karena pembuktian

Apabila seorang anak nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan atau dengan pengakuan, karena syarat-syarat tidak lengkap, maka boleh dia ditetapkan dengan pembuktian. Misalnya seorang isteri mengaku telah melahirkan anak sedang suami tidak

---

<sup>69</sup> Ibid, hal. 144-145

membenarkannya; atau dia membenarkan juga tetapi dia tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu anak yang diakui oleh isteri. Dalam dua hal tersebut, ketentuan nasab tidak dapat dilakukan dengan kelahiran atau dengan kesaksian. Misalnya seorang muslimah yang dikenal sebagai orang yang adil menyaksikan kelahiran anak tersebut atau dengan menetapkan anak tersebut, karena kesaksian orang perempuan dianggap sah dalam hal yang tidak mungkin dilihat orang laki-laki, begitu juga dianggap sah penyaksian seorang dokter laki-laki di jaman kita sekarang ini.

Az-Zuhri pernah berkata : Sunnah telah menetapkan bahwa kesaksian wanita diperkenankan dalam hal yang tidak boleh dilihat kecuali oleh wanita juga, misalnya tentang kelahiran dan aib.

Kesaksian nasab juga dapat dilakukan dengan kemasyhuran dan mendengar-dengarkan berita. Inilah yang berlaku dalam fiqh dan pengadilan. Misalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan menempati sebuah rumah dan bergaul seperti pergaulan suami isteri, maka hal demikian dapat dijadikan bukti bahwa perempuan tersebut adalah isterinya.

Nasab yang diperoleh dengan pembuktian lebih kuat dari pada dengan pengakuan. Oleh karena itu jika ada seorang laki-laki mengaku anak terhadap seseorang dan syarat-syarat pengakuan itu telah terpenuhi, maka anak tersebut dapat ditetapkan sebagai

anaknyanya. Tetapi kalau ada orang lain datang dan membawa bukti-bukti komplit, bahwa anak tersebut adalah anaknyanya, maka anak tersebut diputuskan sebagai anaknyanya, bukan anak orang yang mengaku tadi, karena penetapan nasab itu dengan pembuktian lebih kuat dari pada dengan pengakuan.<sup>70</sup>

#### **b. Hak Susuan**

Sejak anak dilahirkan mereka telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua orang tua adalah yang lebih dekat dan lebih banyak menaruh kasih sayang kepada anak kecil, maka hak-hak tersebut dibebankan kepada kedua orang tuanya. Di antara hak-hak tersebut adalah hak penyusuan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al- Baqarah Ayat 233, yang artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 2 (dua) tahun penuh bagi orang yang mau meenyempurnakan penyusuan itu; dan wajib bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu dengan cara yang pantas; seseorang tidak dibebani kecuali menurut kemampuannya; dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya, begitu juga ayah (jangan disusahkan lantaran) anaknya; dan wajib bagi ahli waris ayah seperti itu juga; maka jika keduanya berkehendak memutuskan penyusuan dengan kerelaan antara mereka berdua serta bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya; dan jika kamu (bapak) mau menyusukan anak-anakmu (kepada orang lain) maka tidak ada dosa atas kamu, jika kamu beri upah dengan cara yang layak; dan takutlah kamu kepada Allah, serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui apa saja yang kamu kerjakan.”

---

<sup>70</sup> Ibid, hal. 145-146



Dan seperti firman Allah SWT pula dalam Surat At-Thalaq

Ayat 6, yang artinya :

“Kalau perempuan (yang kamu cerai) itu dalam keadaan hamil, maka berilah mereka itu nafkah sehingga ia melahirkan anaknya, jika mereka mau menyusui untuk kamu, maka berilah mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan cara yang baik; dan jika kamu kepayahan, maka bolehlah perempuan lain untuk menyusunya.”

Dari kedua ayat tersebut dan beberapa keterangan dari sunnah nabi, maka para ahli fiqh membuat beberapa ketentuan hukum yang dapat kita simpulkan sebagai berikut :

#### **1. Apakah si ibu harus dipaksa untuk menyusui ?**

Kalau si ibu dicerai, maka tidak dipaksa untuk menyusui anaknya, karena menyusui itu tidak ubahnya seperti nafkah, sedang nafkah anak berada di tangan si ayah. Oleh karena itu jika si ayah tidak mempunyai uang, dia harus mencari perempuan lain yang sanggup menyusunya seandainya si ibu berlepas diri. Begitu juga ibu yang tidak dicerai tetap tidak boleh dipaksa supaya menyusui anaknya secara pengadilan, tetapi dia harus dipaksa secara keagamaan. Karena si ibu dalam semua hal harus dipaksa khususnya dalam hal menyusui anak.

- a. Maka apabila seorang anak tidak mau menerima selain tetek dari ibunya, dia harus dipaksa untuk menyusunya guna menjaga kelangsungan hidup si bayi. Hal ini berlaku juga apabila si anak tidak juga mau minum susu buatan.

- b. Seorang ibu harus dipaksa juga untuk menyusui anaknya apabila ayah tidak mempunyai uang sedang si anak tidak dapat menerima tetek orang lain yang diupah.

## **2. Apakah si ibu berhak mendapat upah menyusui ?**

Apabila penyusuan itu dilakukan masih dalam ikatan perkawinan atau perempuan yang masih dalam masa iddah karena talak *raj'i*, maka si perempuan tersebut tidak berhak mendapat nafkah karena penyusuannya itu sebab nafkah isteri dan perempuan yang masih dalam masa iddah adalah menjadi tanggung jawab suami.

Tetapi apabila iddah talak *raj'i* itu telah habis, barulah si isteri tersebut berhak menerima upah, karena nafkah iddah itu telah habis pula.

Talak *raj'i* ialah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan isteri yang disertai uang tebusan (*iwad*), selama masih dalam masa iddah.

Dengan demikian apabila seorang suami menjatuhkan talak pertama atau kedua atas isteri seperti diterangkan di atas itu dapat merujuknya, kembali hidup bersama tanpa memerlukan akad nikah baru selama masa iddah belum habis.

### **3. Lamanya menyusui**

Lamanya waktu di mana seorang ibu berhak menerima upah penyusuan yaitu 2 (dua) tahun. Dasar yang dipakai oleh ahli-ahli fiqh itu ialah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang artinya :

“Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang mau menyempurnakan penyusuan.”

Tetapi kalau perempuan yang menyusui itu bukan ibu kandung sendiri, maka dia berhak mendapat upah sesuai dengan persetujuan. Apabila masanya telah habis, maka dia tidak boleh lagi dipaksa untuk menyusui, kecuali apabila si anak tidak mau menerima tetek orang lain, sedang dia masih sangat memerlukan penyusuan. Waktu itu si perempuan tersebut harus dipaksa untuk melanjutkan penyusuannya dengan tambahan upah yang layak.<sup>71</sup>

#### **c. Hak Pemeliharaan**

Yang dimaksud dengan pemeliharaan bagi seorang anak kecil yaitu tentang pendidikannya serta memperhatikan semua urusannya, oleh orang yang berhak dalam masalah tersebut. Fase pertama pemeliharaan itu diserahkan kepada ibunya, karena orang pertama yang lebih menaruh belas kasih terhadap anak. Ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari pada ayah.

---

<sup>71</sup> Ibid, hal. 148-150

Oleh karena itu maka hak pemeliharaan didahulukan kepada orang-orang perempuan dari mahram si anak, ditinjau dari segi nasab, kemudian baru kepada perempuan mahram dari ashabah, dan selanjutnya baru kepada perempuan mahram dari selain ashabah. Atau dengan kata lain, bahwa yang diutamakan adalah keluarga terdekat dan seterusnya guna menjaga rasa belas kasih terhadap anak kecil.

Lebih diutamakannya si ibu dari pada ayah dalam hal pemeliharaan ini berlaku sejak anak itu dilahirkan. Karena itu ayah tidak mempunyai hak memisahkan anak dari ibunya di saat anak itu masih menyusu. Di samping pemeliharaan, harus juga diperhatikan masalah perlindungan dan pengawasan anak terhadap pertumbuhannya, perangnya, dan agamanya.<sup>72</sup>

#### **d. Hak Kewalian**

Seorang ayah mempunyai wewenang untuk mengurus diri dan harta benda anaknya, selama anak-anak tersebut masih di bawah umur. Kewalian terhadap diri ini menyangkut persoalan perkawinan, pendidikan dan pengawasan. Sedangkan kewalian terhadap harta, terbatas dalam urusan harta benda, yaitu ayah harus menyantuni harta anak-anaknya yang masih kecil dan mengaturnya agar dapat bermanfaat.

Jika ayah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat apa-apa, maka boleh menentukan wasiat yang cukup dan adil untuk

---

<sup>72</sup> Ibid, hal. 151-152

menyantuni harta benda anak dengan penjagaan yang baik dan amanat.

Al-Qur'an telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim yang dungkapkan dalam beberapa ayat, antara lain :

Surat Al-Baqarah Ayat 220, yang artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang persoalan anak-anak yatim, maka jawablah! berbuat beres terhadap mereka, adalah sikap yang baik dan jika kamu bercampur dengan mereka maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu; dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang-orang yang berbuat baik.”

Surat An-Nisa' Ayat 2, yang artinya :

“Berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka, dan jangan kamu ganti yang jelek dengan yang baik; dan jangan kamu campur harta-harta mereka itu dengan harta-harta kamu, karena sesungguhnya yang demikian itu dosa besar.”

Surat An-Nisa' Ayat 6, yang artinya :

“Dan cobalah anak-anak yatim itu, sehingga apabila mereka telah sampai umur untuk kawin: maka apabila kamu nampak kecerdasan pada mereka, serahkanlah kepada mereka harta mereka itu; dan janganlah kamu makan harta mereka itu dengan boros dan dengan cepat sebelum dewasa; dan barang siapa mampu, hendaklah ia menjaga diri; dan barang siapa fakir hendaklah ia makan dengan cara yang pantas; maka apabila kamu menyerahkan kepada mereka harta mereka, adakanlah saksi atas mereka itu dan cukuplah Allah sebagai pelindung.”

Surat An-Nisa' Ayat 10, yang artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya mereka itu (sama dengan) makan api dalam perutnya, dan mereka kelak akan masuk ke dalam neraka.”

Surat Al-Israa' Ayat 34, yang artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih baik; sehingga apabila mereka telah mencapai umur dewasa, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan.”

Demikianlah Al-Qur'an menggariskan tentang hukum-hukum kewalian dan wasiat terhadap harta benda anak yatim. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi dan mengurus harta benda orang yang lalai dengan menunjuk orang yang akan bertindak sebagai penerima wasiat guna mengurus harta benda anak yatim, apabila mereka itu tidak mempunyai ayah dan ayah tidak pula memberikan wasiat untuk mengurus mereka itu.

Hal ini juga berlaku bagi hakim sebagai wakil pemerintah untuk selalu mengawasi para wali dan orang yang diwasiati dalam mempergunakan harta anak yatim itu. Jika mereka salah atau menyimpang harus diluruskan, atau apabila perlu dicabut haknya, karena sesungguhnya mereka itu harus tunduk pada penelitian yang cermat terhadap pekerjaan yang mereka urusi.

Al-Qur'an memperingatkan kepada mereka semua, hendaknya jangan bermain-main terhadap harta anak, dan harus menyerahkan harta itu apabila mereka telah mencapai umur dewasa, yaitu umur di mana si pemilik harta itu telah mampu mempergunakan hartanya tersebut dengan bijaksana dan teliti. Pada prinsipnya mengurus permasalahan ini adalah demi sumbangan, kecuali apabila

orang yang diserahinya itu dalam keadaan tidak mampu, maka dia diperbolehkan mengambil upah dengan cara yang wajar.<sup>73</sup>

**e. Hak Waris**

Setiap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah atau karena akibat perkawinan yang sah berhak mewaris dari kedua orang tuanya.

---

<sup>73</sup> Ibid, hal 169-172

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>74</sup>

Di dalam penelitian hukum dikenal berbagai macam atau jenis dan tipe penelitian. Terjadinya perbedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut pandang dan cara meninjaunya, dan pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis atau macam penelitian itu dipandang penting karena ada keterkaitan antara jenis penelitian dengan sistematika, metode, serta analisa data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.<sup>75</sup>

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan yang mempergunakan sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 5

<sup>75</sup> Waluyo B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7



prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi sampel yang diteliti.<sup>76</sup>

Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>77</sup>

Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.<sup>78</sup>

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan dan menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan :

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan

---

<sup>76</sup> Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974, hal. 27-29

<sup>77</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 3

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 1

dan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder.

Perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang digunakan adalah aturan-aturan Hukum Islam baik yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang berupa teori-teori dari para ulama fiqh, yang relevan dengan permasalahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil dan kedudukan anak yang dikandungnya.

Sedangkan pengertian empirisnya adalah bahwa di dalam mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang akan diteliti, yaitu tentang keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus.

Penelitian di lapangan dilakukan terhadap wanita hamil yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Tentu saja hal ini dilakukan dengan merahasiakan identitas dari pelaku yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>79</sup>

Peraturan perundang-undangan menurut Hukum Islam yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus.

Data yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

### **C. Metode Penentuan Sampel**

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel bertujuan atau dilakukan dengan cara mengambil subyek dan obyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya,

---

<sup>79</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.<sup>81</sup>

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka penulis mengambil sampel : Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudus Kota, 3 orang ulama dan tokoh masyarakat, 10 orang warga masyarakat di mana terdapat wanita hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan, 2 orang wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya yang bersedia menjadi responden tetapi identitasnya dirahasiakan oleh penulis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/ pengamatan, interview/ wawancara, questionere/ angket.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid, hal.51

<sup>81</sup> Ibid, hal.44

<sup>82</sup> Ibid, hal 44

Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara atau tanya jawab dengan informan atau responden. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/ tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam.<sup>83</sup>

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

2. Peraturan dasar, yaitu :

-Batang tubuh UUD 1945

-Ketetapan-ketetapan MPR (S)

3. Peraturan Perundang-undangan :

---

<sup>83</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.172

-Undang-undang atau Perpu

-Peraturan Pemerintah

-Keputusan Presiden

-Keputusan Menteri

-Peraturan Daerah

4. Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat

5. Yurisprudensi

6. Traktat

7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW).

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 116-117

## **E. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Op. Cit, hal.119

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **A.1. Letak Geografi**

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 4 (empat) Kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Letak Kabupaten Kudus antara  $110^{\circ} 36'$  dan  $110^{\circ} 50'$  Bujur Timur dan antara  $6^{\circ} 51'$  dan  $7^{\circ} 16'$  Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 Kilometer dan dari utara ke selatan adalah 22 Kilometer.<sup>86</sup>

##### **A.2. Luas Penggunaan Lahan**

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 124 Desa serta 7 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 Hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe,

---

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kudus Dalam Angka*, Kudus, 2002, hal. 1



yaitu 8.584 Hektar atau 20,19 persen, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Hektar atau 2,46 persen dari luas Kabupaten Kudus.

Luas yang ada terdiri dari 21.704 Hektar atau 51,04 persen merupakan lahan sawah dan 20.812 Hektar atau 48,96 persen adalah bukan lahan sawah. Jika dilihat menurut penggunaannya, Kabupaten Kudus terdiri atas lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 4.203 Hektar atau 9,88 persen dan sisanya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lainnya. Sedangkan bukan lahan sawah yang digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar seluas 9.983 Hektar atau 23,48 persen dari luas Kabupaten Kudus.<sup>87</sup>

### **A.3. Wilayah Administrasi**

Kabupaten Kudus terbagi atas 9 kecamatan, 124 desa, dan 7 kelurahan, 684 Rukun Warga (RW), 3.527 Rukun Tetangga (RT) dan 371 Dukuh/ Lingkungan. Kecamatan Kota merupakan Kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/ kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae adalah kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan terkecil. 9 kecamatan tersebut antara lain adalah :

1. Kecamatan Kaliwungu
2. Kecamatan Kota

---

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kudus Dalam Angka*, Ibid, hal. 1

3. Kecamatan Jati
4. Kecamatan Undaan
5. Kecamatan Mejobo
6. Kecamatan Jekulo
7. Kecamatan Bae
8. Kecamatan Gebog
9. Kecamatan Dawe.<sup>88</sup>

#### **A.4. Kependudukan**

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2002 tercatat sebesar 719.193 jiwa, terdiri dari 354.899 jiwa laki-laki atau 49,35 persen dan 364.294 jiwa perempuan atau 50,65 persen.

Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada Tahun 2002 sebesar 97,42 yang berarti bahwa 100 setiap penduduk terdapat 97

---

<sup>88</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Sekilas Statistik Kabupaten Kudus*, Kudus, 2002, hal. 4-5

penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat di semua kecamatan bahwa angka rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu berkisar antara 93,88 dan 99,69.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus pada Tahun 2002 tercatat sebesar 1.672 jiwa/ Km<sup>2</sup> . Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kota, yakni 8.758 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan dengan kepadatan terkecil adalah Kecamatan Undaan sebesar 856 jiwa/ Km<sup>2</sup> .<sup>89</sup>

#### **A.5. Sosial**

Salah satu indikator tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu daerah adalah tingginya tingkat pendidikan penduduknya. Dari tahun ke tahun tampak bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus makin lama makin tinggi. Demikian pula halnya dengan program wajib belajar 9 tahun juga telah berjalan dengan baik, sehingga dengan sendirinya jumlah anak tidak sekolah atau putus sekolah juga makin sedikit jumlahnya.

Tingkat kematian dan kelahiran tercatat relatif kecil, masing-masing 13,10 dan 6,64 per mil. Ini menunjukkan bahwa di samping kesadaran masyarakat akan norma keluarga kecil telah meningkat juga tingkat kehidupan masyarakat menunjukkan peningkatan sehingga

---

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Sekilas Statistik Kabupaten Kudus*, Ibid, hal. 13-14

kesehatan dan umur yang panjang bisa terwujud. Hal tersebut di dukung pula oleh prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai.

Suasana kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat didambakan masyarakat. Beragam tempat peribadatan, merupakan salah satu bukti kerukunan agama di antara umat. Tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2002 adalah 526 Masjid, 1.663 Mushola/ langgar, 23 Gereja Kristen, 4 Gereja Katolik, 9 Vihara dan 3 Klenteng.

Kegiatan keagamaan juga berjalan dengan baik dan semarak. Ini bisa dilihat dari terus bertambahnya tempat ibadah maupun maraknya kegiatan keagamaan yang ada. Animo masyarakat muslim untuk pergi haji misalnya, juga tetap tinggi di mana pada Tahun 2002 tercatat sebesar 1.353 orang atau turun 0,08 persen di banding tahun sebelumnya.<sup>90</sup>

Di Kabupaten Kudus selama tahun 2002 terjadi peristiwa pernikahan 6.890, talak 191, cerai 304 dan rujuk 2, sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini :

---

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Sekilas Statistik Kabupaten Kudus*, Ibid, hal. 31-32

## **B. Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamil Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Kudus**

Karena pengambilan judul dalam tesis ini memfokuskan pada Hukum Islam maka pembahasan keabsahan perkawinan hanya akan dilakukan menurut Hukum Islam saja.

Pada saat sekarang ini dengan bertambah majunya tingkat perekonomian masyarakat Indonesia mempunyai dampak yang sangat luas. Modernitas - di samping bermanfaat- telah banyak membawa korban pelecehan seksual dan kebutuhan biologis lainnya, sebagai akibat menjamurnya pergaulan bebas, *free sex*, dan kumpul kebo yang cenderung semakin marak. Akibat yang sering terjadi dari hal tersebut di atas adalah terjadinya kehamilan di luar nikah. Akhirnya pernikahan merupakan jalan keluar yang terhormat yang ditempuh dalam mengentaskan persoalan ini.

Karena semakin sering terjadi kasus wanita hamil ini, dan di masyarakat sendiri timbul berbagai macam pendapat serta tidak ada keseragaman tentang hukumnya, maka pemerintah, dalam hal ini berdasarkan keputusan bersama adalah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/ KMA/ 1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 disusunlah Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan menyeragamkan peraturan-peraturan tentang Hukum Islam.

Perkawinan wanita hamil di atur dalam Bab VIII Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas jelaslah kiranya bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilaksanakan dan hukumnya sah, walaupun perbuatan pasangan tersebut termasuk perbuatan dosa. Sudah seharusnya apabila diketahui adanya kehamilan di luar nikah hendaknya pasangan tersebut segera melaksanakan perkawinan, hal ini khususnya apabila status wanita hamil tersebut masih gadis. Sedangkan apabila wanita yang hamil di luar nikah tersebut adalah janda, maka perkawinan baru boleh dilaksanakan setelah anak yang dikandungnya lahir, atau menunggu masa iddah nya habis.

Seperti menurut pendapat Imam Syafi'i mengenai perkawinan wanita hamil yang mengatakan :

“Yang diutamakan yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya sebelum usia kehamilannya mencapai 6 (enam) bulan.”

Tetapi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya mengatur tentang perkawinan wanita hamil dengan pasangannya (laki-laki yang menghamilinya). Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah :

“Sebuah kitab yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis Hukum Islam yang menentukan wanita hamil diwajibkan menikah dengan orang (laki-laki) yang menghamilinya.”<sup>91</sup>

Bagaimanakah hukumnya jika terjadi suatu keadaan di mana seorang wanita yang sudah terlanjur hamil, tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak mau menikahinya, dan yang mau menikahinya adalah laki-laki yang tidak menghamilinya, sebagaimana pembahasan yang di ambil dalam tesis ini, yaitu tentang keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kedudukan anak yang dikandungnya menurut Hukum Islam di Kabupaten Kudus.

Dengan dilaksanakannya perkawinan atas wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, para fukaha saling berselisih pendapat. Menurut pendapat :

1. Abu Hanifah; Muhammad bin Hasan dan Syafi'i;

Perkawinan wanita hamil dari zina dengan laki-laki bukan kawan berzinanya itu boleh dilakukan seketika sebab wanita itu tidak disebutkan dalam Al-

---

<sup>91</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1995/ 1996

Qur'an termasuk wanita yang haram dinikah. Oleh karenanya, termasuk wanita yang halal dinikah dengan ketentuan Al-Qur'an, yaitu yang mengatakan bahwa selain yang telah disebutkan sebelumnya, halal dikawin (An-Nisa' : 22-24). Namun suami tidak boleh menggaulinya hingga perempuan ini melahirkan anak yang ada dikandungannya, dengan alasan :

- a. Hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Turmudzi Ruwaifi'i bin Tsabit Al-Anshari yang mengajarkan :

**“Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.”**

Sedangkan Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hal tersebut di atas adalah :

- b. Surat An-Nisa' Ayat 22 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”**

- c. Surat An-Nisa' Ayat 23 yang artinya sebagai berikut :

**“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuanmu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun**



(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

d. Surat An-Nisa’ Ayat 24 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”**

Dari Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 22-24 tersebut di atas disebutkan macam-macam perempuan yang haram dinikah laki-laki, yang dapat dibagi 2 (dua) :

#### **Perempuan yang haram dinikah untuk selamanya**

Sebab-sebab wanita haram dinikah untuk selamanya ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Karena hubungan nasab :
  - a. Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu ibu, nenek dari garis ayah atau ibu dan seterusnya ke atas
  - b. Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah,

yaitu anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun perempuan), buyut perempuan dan seterusnya ke bawah

- c. Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu), seayah saja atau seibu saja
  - d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas, yaitu saudara kakek atau nenek, saudara kakek buyut atau nenek buyut dan sebagainya
  - e. Kemenakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah
2. Karena hubungan susuan :
- a. Ibu susuan, ibu yang menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu anak yang disusui
  - b. Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan (suami ibu susuan dipandang seperti ayah sendiri bagi anak susuan)
  - c. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau suami ibu susuan dan seterusnya ke atas
  - d. Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara sendiri
  - e. Saudara perempuan sesusuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja; yang disebut saudara perempuan sesusuan kandung adalah yang disusui ibu susuan dari suaminya (ayah susuan), baik

disusui bersama-sama dengan anak susuan, sebelumnya atau sesudahnya. Yang disebut saudara perempuan sesusuan seayah adalah yang disusui oleh isteri dari ayah susuan; dan yang dimaksud dengan saudara perempuan sesusuan seibu ialah disusui oleh ibu susuan dari laki-laki lain..

3. Karena hubungan semenda :

- a. Mertua, yaitu ibu kandung isteri, demikian pula nenek isteri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. Haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas itu tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan antara suami dan isteri bersangkutan. Dengan terjadinya akad nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas tersebut
- b. Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak. Apabila belum pernah terjadi persetubuhan, tiba-tiba suami isteri bercerai, karena talak atau kematian, dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan anak tirinya
- c. Menantu, yaitu isteri anak, isteri cucu (dari anak laki-laki maupun perempuan) dan seterusnya ke bawah, tanpa syarat setelah terjadi persetubuhan antara suami dan isteri
- d. Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan antara suami dan isteri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah

dan seorang perempuan telah berakibat haram nikah antara anak dan ibu tiri.

4. Karena sumpah li'an.

Apabila seorang suami menuduh isterinya berzina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan persaksian kepada Allah SWT bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu, sampai 3 (empat) kali, dan yang kelimanya ia bersedia menerima laknat Allah SWT apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya tersebut.

Isteri yang dituduh berzina akan terbebas dari hukuman zina apabila ia pun menyatakan persaksian kepada Allah SWT bahwa suaminya berdusta, sampai 4 (empat) kali, dan yang kelimanya ia pun menyatakan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah SWT apabila ternyata suaminya benar.

**Perempuan yang haram dinikah untuk sementara**

1. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi isteri seseorang.

Apabila dengan jalan pergantian, setelah berpisah dengan salah seorang saudara, lalu ganti mengawini saudaranya diperbolehkan. Hal ini sering terjadi pada seseorang karena kematian isterinya lalu ganti mengawini adik iparnya. Kecuali larangan mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menurut ketentuan Al-Qur'an, hadist Nabi mengajarkan pula bahwa tidak boleh seseorang mengumpulkan antara seorang perempuan

dan bibinya (saudara ayah atau ibu); demikian pula antara seorang perempuan dan kerabatnya jika diperkirakan salah satunya laki-laki tidak dibolehkan kawin dengan yang lain; misalnya antara seorang perempuan dan kemenakannya, seorang perempuan dan cucunya dan sebagainya

2. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 24
3. Perempuan sedang dalam menjalani masa iddah, baik iddah kematian maupun iddah talak
4. Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suami yang mentalaknya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya
5. Perkawinan orang yang sedang ihram, melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain. Hadist Nabi riwayat Muslim dari Usman bin Affan mengajarkan, "Orang yang sedang menjalani ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang." Nikah orang yang sedang menjalani ihram apabila terjadi juga, dipandang batal, tidak mempunyai akibat hukum
6. Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. QS An-Nur : 3 yang artinya menyebutkan bahwa :

**“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”**

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila pezina benar-benar bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya pada masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah, pasti Allah akan menerima tobatnya dan akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang saleh.

Ayat yang masih ada hubungannya dengan hal tersebut di atas antara lain adalah :

➤ Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 68 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan orang-orang yang menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang demikian itu, niscaya dia mendapat (balasan atas) dosa-dosa (nya).”**

➤ Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 69 yang artinya sebagai berikut :

**“(Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal didalamnya, dalam keadaan terhina.”**

➤ Al-Qur'an Surat Al-Furqan Ayat 70 yang artinya sebagai berikut :

**“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itu kejahatannya diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”**

Dari QS Al-Furqan : 68-70 di atas, maka disebutkan beberapa sifat orang-orang saleh antara lain tidak musyrik, tidak membunuh tanpa alasan yang sah dan tidak berzina. Orang-orang yang berbuat demikian akan menanggung dosa, dilipatgandakan siksaanya pada hari kiamat dan akan kekal menderita siksaan; kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman, dan beramal saleh; Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Oleh sebab itu maka orang yang sudah cukup umur, sudah bekerja dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah hendaknya bersegera untuk menikah karena akan menghindarkan dirinya dari berbuat zina.

7. Mengawini wanita musyrik. Para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan QS Al-Baqarah : 221 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya**

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Kepercayaan syirik adalah yang mempertuhankan selain Allah, apa pun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Para penganut agama Yahudi dan Nasrani disebut dalam Al-Qur'an dengan nama ahli kitab. Laki-laki muslim menurut ketentuan dalam QS Al-Maidah : 5 diperbolehkan kawin dengan ahli kitab; tetapi apabila kita perhatikan pula ayat-ayat lain, kebolehan ini tidak mutlak, melainkan dengan syarat bahwa suami yang beragama Islam itu tidak dikhawatirkan akan terdesak mengikuti agama isteri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah, disebabkan lemah iman atau lemah kedudukannya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sedang wanita muslimah sama sekali tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki non muslim. QS Al-Maidah Ayat 5 yang artinya sebagai berikut :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu (halal) pula bagi mereka. **(Dan dihalalkan mengawini)** wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan **wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu**, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”



QS Al-Baqarah : 221 melarang wali menikahkan perempuan beragama Islam dengan laki-laki musyrik, QS Al-Baqarah Ayat 221 artinya sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. **Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.** Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

QS Al-Mumtahanah : 10 menegaskan bahwa perempuan muslimah tidak halal kawin dengan laki-laki kafir. QS Al-Mumtahanah Ayat 10 artinya berbunyi sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman **maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.** Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa bagimu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta pula mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

8. Kawin dengan lebih dari 4 (empat) isteri. QS An-Nisa' : 3 memberi kelonggaran laki-laki kawin poligami sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang isteri. Laki-laki yang telah mempunyai 4 (empat) orang isteri haram kawin lagi dengan isteri kelima dan seterusnya. QS An-Nisa' Ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka **kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.** Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

2. Abu Yusuf; Zulfar; Malik dan Ahmad bin Hambal; berpendapat bahwa :

Perkawinan wanita hamil dari zina dengan laki-laki bukan kawan berzinanya tersebut tidak sah, untuk menghormat kandungan yang tidak berdosa. Ditambah lagi dengan alasan bahwa tujuan akad nikah adalah untuk memungkinkan hubungan kelamin secara halal, padahal para fukaha sudah sepakat bahwa hubungan kelamin dalam keadaan ini adalah dilarang. Maka, akad nikah yang menjadi jalan untuk hubungan kelamin itu juga dilarang. Dengan demikian menurut pendapat yang terakhir ini, perkawinan dapat dilakukan setelah perempuan yang bersangkutan melahirkan. Pendapat ini apabila dianut maka akan lebih menjamin terpeliharanya nilai-nilai akhlak dalam masyarakat.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, hal. 35-36

Penulis berpendapat bahwa pendapat pertama dari Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Syafi'i lebih dapat diterima. Perkawinan wanita hamil dari zina dengan laki-laki bukan kawan berzinanya itu boleh dilakukan seketika sebab wanita itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an termasuk wanita yang haram dinikah. Oleh karenanya, termasuk wanita yang halal dinikah dengan ketentuan Al-Qur'an, yaitu yang mengatakan bahwa selain yang telah disebutkan sebelumnya, halal dikawin (An-Nisa' : 22-24). Namun suami tidak boleh menggaulinya hingga perempuan ini melahirkan anak yang ada dikandungannya

Selain dari pendapat di atas, penulis juga akan meminta pendapat dari Panitera Pengadilan Agama Kudus, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan para ulama di Kabupaten Kudus.

#### **B.1. Pendapat Panitera Pengadilan Agama Kudus**

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan dari ada atau tidaknya kehamilan yang sudah terjadi sebelum nikah. Keabsahan perkawinan, baik yang dilakukan oleh wanita yang masih suci (gadis) maupun oleh wanita yang sudah hamil terlebih dahulu ditentukan oleh dipenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah menurut Hukum Islam. Apabila syarat dan rukun nikah dipenuhi maka perkawinannya sah, demikian pula sebaliknya apabila syarat dan rukun nikah tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Syafi'i sebagaimana telah dijabarkan di atas.

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya sudah sah karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, oleh karena itu tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.<sup>93</sup>

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Q. II Surat Al-Baqarah Ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Surat Al-Maidah Ayat 5 (Q. V : 5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Surat An-Nisa' Ayat 22, 23 dan 24.

Ayat-ayat sebagaimana tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini :

---

<sup>93</sup> Abdul Wahid, Wawancara, Panitera Pengadilan Agama Kudus, tanggal 20 Mei 2004

- QS Al-Baqarah Ayat 221 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”**

- QS Al-Maidah Ayat 5 yang artinya sebagai berikut :

**“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu (halal) pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”**

- Surat An-Nisa' Ayat 22 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”**

- Surat An-Nisa' Ayat 23 yang artinya sebagai berikut :

**“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuanmu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”**

➤ Surat An-Nisa' Ayat 24 yang artinya sebagai berikut :

**“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”**

Allah menetapkan suatu aturan atau ketentuan bagi manusia adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Apabila aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah mengenai perkawinan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221, Surat Al-

Maidah Ayat 5, Surat An-Nisa' Ayat 22, 23 dan 24 di atas dipenuhi maka akan membawa manfaat dalam kehidupan manusia itu sendiri.

b. Syarat khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan

2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat rohani maupun jasmani

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan

d. Harus ada wali nikah

e. Harus ada 2 (dua) orang saksi, Islam, dewasa dan adil

f. Membayar mahar

g. Sebagai proses akhir dan lanjutan dari Akad Nikah adalah pernyataan Ijab dan Qabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qabul

artinya adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.<sup>94</sup>

Apabila semua rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam sudah dipenuhi, maka perkawinan tersebut sudah sah. Begitu juga dengan perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.

## **B.2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya bisa langsung dilaksanakan atau dilakukan dan hukumnya sah apabila wanita tersebut adalah seorang gadis yang belum pernah menikah (perawan). Tetapi kalau wanita yang hamil di luar nikah tersebut statusnya adalah seorang janda maka dia harus menunggu sampai masa iddah nya habis atau menunggu sampai dengan lahirnya anak yang dikandungnya.

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya sudah sah karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam tersebut tidak perlu

---

<sup>94</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, hal. 50-53



dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.<sup>95</sup>

Meskipun perkawinan tersebut di atas sudah sah menurut Hukum Islam, tetapi sebagai umat Islam yang hidup di Negara Indonesia maka harus juga mengikuti hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ”

Dari isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi orang Islam Indonesia, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Agama Islam.

Pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tersebut di atas dapat dianalisa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan

---

<sup>95</sup> Cholil, AG, Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, tanggal 14 Mei 2004

2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas ataupun ke bawah
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/ bapak tiri
  - d. Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/ paman susuan
  - e. Berhubungan saudara dengan siteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
- 6. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi dari pengadilan
  - 7. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
  - 8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu
  - 9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>96</sup>

Sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia maka selain harus memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **B.3. Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kudus**

#### **a. Kyai H. Daenuri, BA**

Menurut beliau perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya boleh dilaksanakan dan hukumnya adalah sah, sebab itu adalah pilihan atau alternatif yang lebih baik dari pada tidak dinikahi. Seperti menurut madzhab Syafi'i yang terdapat dalam kitab *Mughyatul Mustarsyidin* :

“Boleh menikahi wanita yang hamil dari perbuatan zina, baik oleh pezinanya sendiri (laki-laki yang menghamilinya) ataupun orang lain (laki-laki yang tidak menghamilinya), hanya saja menggaulinya hukumnya makruh.”

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya sudah sah karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam

---

<sup>96</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, hal. 58-59

tersebut tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.<sup>97</sup>

**b. Kyai H. Masykuri**

Menurut beliau perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya boleh dilakukan atau dilaksanakan dan hukumnya sah agar tidak menanggung malu, baik bagi diri wanita itu sendiri dan anak yang dikandungnya, keluarganya, maupun lingkungan disekitarnya.

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya sudah sah karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam tersebut tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.<sup>98</sup>

**c. Hj. Chumaidah**

Menurut beliau perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya boleh dilaksanakan dan hukumnya sah karena dilihat dari segi manfaatnya memang harus dinikahi agar tidak terjadi frustrasi bagi si wanita itu sendiri dan anak

---

<sup>97</sup> Daenuri, Wawancara, Ulama di Kabupaten Kudus, tanggal 22 Mei 2004

<sup>98</sup> Masykuri, Wawancara, Ulama di Kabupaten Kudus, tanggal 23 Mei 2004

yang dikandungnya. Menurut Hukum Islam seperti yang tertera di dalam fiqh Surat Al-Muhazad juz 2 disebutkan bahwa :

“Boleh mengawini wanita yang hamil karena zina, sebab kehamilannya itu tidak dihubungkan dengan seseorang, adanya kehamilan tersebut sama dengan tidak adanya.”<sup>99</sup>

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya sudah sah karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam tersebut tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.<sup>100</sup>

Dari pendapat ketiga ulama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.

Tetapi karena Pemerintah juga melakukan pengaturan tentang syarat sahnya perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai Warga Negara Indonesia ketentuan-

---

<sup>99</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam tentang NTCR I*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1995

<sup>100</sup> Chumaidah, Wawancara, Ulama di Kabupaten Kudus, tanggal 24 Mei 2004

yang dikandungnya. Menurut Hukum Islam seperti yang tertera di dalam fiqh Surat Al-Muhazad juz 2 disebutkan bahwa :

“Boleh mengawini wanita yang hamil karena zina, sebab kehamilannya itu tidak dihubungkan dengan seseorang, adanya kehamilan tersebut sama dengan tidak adanya.”<sup>99</sup>

Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya sudah sah karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam tersebut tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.<sup>100</sup>

Dari pendapat ketiga ulama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan perkawinan lagi karena dalam perkawinan hanya satu kali saja dilakukan ijab qobul.

Tetapi karena Pemerintah juga melakukan pengaturan tentang syarat sahnya perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai Warga Negara Indonesia ketentuan-

---

<sup>99</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam tentang NTCR I*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1995

<sup>100</sup> Chumaidah, Wawancara, Ulama di Kabupaten Kudus, tanggal 24 Mei 2004

ketentuan tersebut juga harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan diakui oleh negara.

#### **B.4. Pencatatan Perkawinan Merupakan Suatu Syarat Diakuinya Suatu Perkawinan Oleh Negara**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh Hukum Adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/ Katolik, Hindu, dan Budha Indonesia.<sup>101</sup>

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>101</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 29



Memang pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut di atas sudah sah menurut Hukum Agama Islam karena sudah memenuhi rukun-rukun syarat-syarat perkawinan, akan tetapi perlu dilakukan pencatatan sebagai tindakan administratif. Dengan demikian pencatatan tidak merupakan saat untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, melainkan hanya merupakan tindakan yang bersifat administratif saja tetapi merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.<sup>102</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak menjelaskan maksud diadakannya pencatatan perkawinan. Penjelasan umum hanya mengatakan bahwa tiap-tiap pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang umpamanya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa tersebut dapat menjadi jelas, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan dimuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Jadi merupakan bukti otentik satu-satunya dari suatu perkawinan.

---

<sup>102</sup> Cholil AG, Op. Cit

Sekedar memberikan kejelasan terhadap keadaan tersebut, dapat diberikan contoh mengenai akibat yang timbul terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu tidak memberikan jaminan hukum bagi suami isteri, sehingga jika terjadi perceraian maka pada dasarnya pejabat tidak dapat memberikan keterangan bahwa mereka adalah suami isteri. Juga dalam masalah pewarisan, seandainya salah satu meninggal dunia, maka sulit dipecahkan masalah pembagian harta bersama. Dan kesulitan-kesulitan lain apabila berurusan dengan instansi-instansi sehubungan dengan perkawinannya karena tidak ada bukti otentiknya.<sup>103</sup>

Sebagaimana diketahui ada 2 (dua) instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor

---

<sup>103</sup> Yunanto, *Keberadaan Lembaga Pengesahan Perkawinan*, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal. 21

Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jadi lembaga pencatat perkawinan baik itu Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) hanya berwenang melakukan pencatatan perkawinan, bukan melangsungkan dalam arti mengesahkan suatu perkawinan. Fungsi mencatat perkawinan adalah memeriksa, apakah syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak, melakukan pencatatan perkawinan, dan menerbitkan akta perkawinan. Sementara itu yang berhak melakukan tugas melangsungkan perkawinan adalah pejabat agama seperti penghulu, pendeta, pastor dan sebagainya.<sup>104</sup>

#### **B.5. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Kudus**

Proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

##### **a. Pemberitahuan kehendak nikah**

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu Pejabat Pencatat Nikah ataupun BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelaksanaan Perkawinan) dalam memberikan nasehat dan bimbingan hendaknya

---

<sup>104</sup> Ibid

mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut :

- Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta atau setuju, dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestuinnya. Hal ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat ijin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.
- Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut Hukum Munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri dan sebagainya.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan *imunisasi tetanus toxoid*.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pejabat Pencatat Nikah

yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu :

- Surat persetujuan calon mempelai.
- Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya, untuk keperluan administrasi yang bersangkutan menyerahkan salinan atau fotocopynya).
- Surat keterangan tentang orang tua.
- Surat keterangan untuk Nikah.
- Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
- Akta cerai talak atau cerai gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau Cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
- Surat keterangan kematian suami atau isteri yang dibuat oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami atau isteri, jika calon mempelai seorang janda atau duda karena kematian suami atau isteri.
- Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (2 s/d 6) dan

Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman.
- Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan bagi mereka yang tidak mampu.

Pembantu Pejabat Pencatat Nikah (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai isteri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu Pejabat Pencatat Nikah, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu Pejabat Pencatat Nikah tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pejabat Pencatat Nikah (di luar Jawa dan Madura) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi Hukum Munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan.

b. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami atau calon isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri.

Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan terhadap calon suami atau calon isteri dan wali nikah itu terpaksa dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

1. Nikah yang diawasi oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN)

- Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah.
- Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang II, III, dan IV dalam Daftar Pemeriksaan Nikah dan ruang lainnya diisi oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN).
- Dibaca dan bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
- Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
- Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) membuat buku yang diberi nama “Catatan Pemeriksaan Nikah” sebagai berikut :

N O	T G L	Nama Calon		Hari/ Tgl Ketentuan Akad Nikah	Peg. yang di Tugas hadir di i nikah Akad		No Akta Nikah	K E T
		Suami	Isteri		Nama	Tanda Tangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Pada ujung sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas dan berkode desa serta tahun.

Contoh : 06/ 7/ 2004.

Angka 06 adalah angka urut pemeriksaan dalam tahun itu, angka 7 adalah kode desa tempat dilangsungkan pernikahan dan angka 2004 adalah tahun pelaksanaan pemeriksaan nikah.

- Pejabat Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah.
2. Nikah yang diawasi oleh Pembantu Pejabat Pencatat Nikah ( di luar Jawa dan Madura)
- Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah, dibuat rangkap 2 (dua).



- Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang II, III dan IV dalam Daftar Pemeriksaan Nikah, dan ruang lainnya diisi oleh Pembantu Pejabat Pencatat Nikah.
- Dibaca dan bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
- Setelah dibaca kemudian kedua lembar tersebut ditandatanganani oleh yang diperiksa dan Pembantu Pejabat Pencatat Nikah yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
- Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, Pembantu Pejabat Pencatat Nikah mencatat dalam buku “Catatan Pemeriksaan Nikah” yang diberi kolom sebagai berikut :

N O	T G L	Nama	Calon	Hari/ Tgl Ketentuan Akad Nikah	Biaya	Nomor Akta Nikah KUA Kecamatan	K E T
		Suami	Isteri				
1	2	3	4	5	6	7	8

- Pada ujung sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas.
  - Pembantu Pejabat Pencatat Nikah mengumumkan kehendak nikah.
  - Setelah itu, surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan Catatan Pemeriksaan Nikah dan disimpan dalam sebuah map.
  - Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilaksanakan, maka akad nikah itu dicatat dan dibaca di hadapan suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani.
  - Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah maka lembar yang sudah ditandatangani dan surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang bersangkutan beserta biayanya.
  - Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang menerima berkas-berkas tersebut dari Pembantu Pejabat Pencatat Nikah selanjutnya memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat dalam Akta Nikah dan menandatangani.
- Kemudian Pejabat Pencatat Nikah Pejabat (PPN) membuat Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya diberikan kepada Pembantu

Pejabat Pencatat Nikah untuk disampaikan kepada suami dan isteri.

c. Pengumuman kehendak nikah

Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pejabat Pencatat Nikah mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan :

- Oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- Oleh Pembantu Pejabat Pencatat Nikah di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pejabat Pencatat Nikah tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

Dalam kesempatan waktu 10 (sepuluh) hari ini, calon suami dan calon isteri seyogyanya mendapat nasehat perkawinan dari BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) setempat.

d. Akad nikah dan pencatatannya

- Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah.
- Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, maka nikah itu akan dicatat dalam form tersendiri dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah saksi-saksi serta Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah dan ditandatangani hanya oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau wakil Pejabat Pencatat Nikah.
- Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau wakil Pejabat Pencatat Nikah.
- Pejabat Pencatat Nikah (PPN) membuatkan Kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua), dengan kode dan nomor yang sama. Angka tersebut (.../.../.../...) menunjukkan nomor urut dalam tahun, nomor urut dalam bulan, angka Romawi bulan dan tahun.

- Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan isteri.
- Nomor di tengah Daftar Pemeriksaan Nikah diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal wakil Pejabat Pencatat Nikah yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, wakil Pejabat Pencatat Nikah hanya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah pada kolom 5 dan menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.
- Pejabat Pencatat Nikah (PPN) berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah telah selesai dikerjakan.
- Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau cerai gugat, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang menerbitkan Akta Cerainya, bahwa janda atau duda tersebut telah menikah. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirimkan kembali form tersebut kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah.

Dalam hal perceraian itu terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka :

- Pejabat Pencatat Nikah (PPN) membuat catatan pinggir (“catatan lain-lain”) pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai terdahulu, bahwa orang tersebut telah menikah dengan menyebutkan tempat, tanggal dan nomor Kutipan Akta Nikah serta ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN).
- Dalam hal perceraianya didaftar di tempat lain, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang mendaftarkan perceraian tersebut bahwa janda atau duda tersebut telah menikah dengan menggunakan form.

Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menerima pemberitahuan dan mencatat hal tersebut dalam “catatan lain-lain” pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian mengembalikan form tersebut setelah dibubuhi stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pengirim pemberitahuan setelah menerima kembali, menyimpan form tersebut bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah.

Begitulah proses pelaksanaan pencatatan nikah yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah sampai

dengan pembuatan Kutipan Akta Nikah di Kabupaten Kudus. Setelah keluarnya Kutipan Akta Nikah maka perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut di atas selain sudah sah menurut Hukum Agama Islam karena sudah memenuhi rukun-rukun syarat-syarat perkawinan, juga sudah diakui oleh negara karena sudah memenuhi syarat-syarat administratif.<sup>105</sup>

Keabsahan perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh wanita yang hamil di luar nikah bukan dengan laki-laki yang menghamilinya secara agama adalah sudah sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, selain itu juga sah menurut hukum negara dan diakui oleh negara apabila sudah memenuhi syarat-syarat administratif sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

### **C. Kedudukan Anak Yang Dikandung Oleh Wanita Hamil Yang Melaksanakan Perkawinan Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Kudus**

Kajian mengenai kedudukan anak merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgent ketika dikaitkan dengan

---

<sup>105</sup> Ibid

adanya anak luar nikah. Agama Islam dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajarannya yang universal diyakini telah mengkaji segala aspek kehidupan, termasuk persoalan status anak di luar nikah. Dari sini kita dapat mengetahui tentang kedudukan seorang anak.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Al-Qur'an memosisikan sebagai perhiasan dunia, anak juga sebagai hiburan. Oleh karena itu dalam puisi Arab kuno disebutkan :

Anak-anak adalah  
belahan jiwa kita yang berjalan di atas persada  
Tidur tak nyenyak terasa  
bila angin kencang menerpa.<sup>106</sup>

Pernyataan ini merupakan ungkapan orang tua yang sangat menaruh kasih sayang kepada anaknya. Karena “secara alamiah, anak-anak memang selalu berhajat kepada hal-hal yang mengundang kasih sayang, lemah lembut, dan belas kasihan”.<sup>107</sup>

Pembahasan kali ini adalah tentang kedudukan anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam.

Batasan anak luar nikah itu berkaitan erat dengan pernikahan ayah dan ibunya. Selain itu keabsahan seorang anak didasarkan pada saat terjadinya

---

<sup>106</sup> Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, terjemahan Alwiyah Abdurrahman, Cetakan II, Al-Bayan, Bandung, 1987, hal. 15

<sup>107</sup> Abrur Razak Husain, *Hak Anak Dalam Islam*, terjemahan Azwir Buton, Cetakan I, Fikahati Anesta, Jakarta, 1992, hal. 21



konsepsi (pembuahan) dalam rahim seorang ibu yang mengandungnya. Maka batasan atau pengertian anak luar nikah menyangkut 2 hal pokok; pertama, pernikahan ayah ibunya, dan kedua, saat terjadinya konsepsi (pembuahan) janin dalam kandungan.

Istilah “anak luar nikah” oleh Ma’luf didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan tidak sah dan secara yuridis tidak dihubungkan nasabnya kepada suami.<sup>108</sup> Semua anak yang lahir tidak diakibatkan oleh perkawinan yang sah karena dibenihkan sebelum pernikahan itu juga termasuk anak luar nikah. Jadi anak luar nikah adalah anak yang konsepsi (pembuahan) janinnya terjadi di luar (sebelum atau sesudah) perkawinan ayah ibunya. Istilah ini sering disebut anak zina atau anak alam.<sup>109</sup>

Batasan anak sah itu ditentukan pada saat terjadinya konsepsi (pembuahan) janin dalam kandungan (rahim) ibunya. Maka, titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya konsepsi (pembuahan) si anak dalam rahim. Selanjutnya, saat konsepsi (pembuahan) janin itulah awal terjadinya kehamilan. Untuk itu pengertian anak sah harus didasarkan pada permulaan seorang ibu itu mengandung.

---

<sup>108</sup> Hassanain Muhammad Ma’luf, *Al-Mawarits Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, (t.tp.: Matba’ah Al-Madani, 1976, hal. 196

<sup>109</sup> Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya* dalam Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku I, Cetakan III*, Pustaka Firdaus-Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta, 1999, hal. 109

Konsep awal terjadinya kehamilan dalam Islam sangat jelas. Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa batas minimal usia janin dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan. Ketentuan ini diambil dari Al-Qur'an Surat Al-Luqman Ayat 14 yang artinya adalah :

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.”

Maksud ayat ini adalah, bahwa waktu menyapih yang paling lama setelah anak berumur 2 tahun.

Dan berfirman pula Allah SWT dalam Surat Al-Akhqaaf Ayat 15, yang artinya :

“Mengandung dan menyapihkan adalah tiga puluh bulan”.

Ayat pertama memberikan batas menyusui selama 2 (dua) tahun, dan ayat kedua membatasi masa hamil sampai menyapih selama 30 (tiga puluh) bulan atau 2,5 (dua setengah) tahun. Dengan demikian, maka masa hamilnya itu adalah 6 (enam) bulan. Adapun batas maksimalnya, para ahli fiqh Ja'fariyah berpendapat antara 9 (sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal perkawinan yang sah.<sup>110</sup>

Meskipun pembahasan Al-Qur'an secara langsung dan tegas tidak dikaitkan dengan pernikahan, tetapi tentu saja anak itu harus terlahir sebagai akibat dari pernikahan ayah ibunya yang sah.

---

<sup>110</sup> Mu'ammal Hamidy, Op. Cit, hal. 143-144

Idealnya, anak yang diharapkan oleh Agama Islam adalah hanyalah anak dari hasil pernikahan. Untuk itu anak yang dilahirkan oleh setiap muslim harus anak yang menjadi akibat perkawinan yang sah. Anak sah dalam Islam sebagaimana dinyatakan sebelumnya adalah anak yang lahir minimal 6 (enam) bulan setelah pernikahan ayah ibunya yang merupakan akibat pernikahan tersebut. Ini merujuk saat terjadinya konsepsi (pembuahan) janin sebagai titik awal kejadian anak (manusia). Tegasnya, anak sah adalah anak yang terlahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Definisi ini “tidak bisa dipahami” bahwa anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan, karena boleh jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan itu dibenihkan sebelum akad perkawinan ayah dan ibunya. Anak seperti ini jelas bukan sebagai akibat dari perkawinan yang dimaksud. Anak yang bukan sebagai akibat perkawinan yang sah karena dibenihkan sebelum perkawinan ayah dan ibunya itu termasuk anak luar nikah. Anak yang terlahir karena akibat perzinahan, dalam kitab fiqh disebut *walad al-zina* (anak zina), atau juga dikenal dengan anak alam. Anak ini menjadi kebalikan dari anak sah.<sup>111</sup>

Menurut Al-Qur'an, selain anak sah adalah anak zina (tidak sah).<sup>112</sup> Dengan demikian anak luar nikah menjadi penghalus bahasa untuk anak yang tidak sah. Namun, batasan ketidakabsahan anak itu acap kali disalahartikan,

---

<sup>111</sup> Musthofa Rahman, Op. Cit, hal. 54

<sup>112</sup> Abddurrouef, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 96

termasuk di dalamnya adalah pengertian anak sah yang dikonsepsikan dalam Fiqih Indonesia yang terkristalisasi menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai realisasi Fiqih Madzhab Indonesia. Fiqih ini sebagai hasil dari pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Fiqih ini muncul karena adanya pandangan bahwa karena pemaksaan adat-istiadat yang tidak cocok dengan kepribadian Bangsa Indonesia adalah sebuah kesalahan.<sup>113</sup> Sehingga Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang hidup di masyarakat Islam Indonesia.<sup>114</sup> Salah satu persoalan yang menarik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adanya kedudukan anak yang lahir di luar nikah sebagai anak yang sah.<sup>115</sup>

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Rumusan anak sah bagian kedua itu merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung. Ketentuan ini merupakan legitimasi kebolehan menggunakan teknologi kedokteran dalam hal

---

<sup>113</sup> Nourrouzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia : Penggagas Dan Gagasannya, Cetakan I*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 231

<sup>114</sup> Sayuti Thalib, *Receptio In Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario, Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 45

<sup>115</sup> Musthofa Rahman, *Op. Cit.*, hal. 35-36

konsepsi (pembuahan) janin (anak) dalam kandungan. Menurut ketentuan itu dapat diketahui bahwa :

1. Pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan
2. Pembuahan itu berasal dari sperma suami isteri yang sah dan dilahirkan oleh isteri itu sendiri
3. Tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim perempuan lain.<sup>116</sup>

Dari rumusan anak sah point b tentang bayi tabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami secara jelas bahwa bayi tabung itu harus terjadi setelah pernikahan suami isteri yang sah sebagai calon ayah dan ibu bagi si bayi. Sehingga anak itu merupakan akibat dari perkawinan sepasang suami isteri tersebut.

Sedangkan rumusan anak sah dalam point a sama persis dengan rumusan dalam Undang-undang Perkawinan, yang dapat ditarik pengertian, bahwa : anak sah adalah anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan dan sebagai “akibat” perkawinan yang sah.

Setelah pembahasan di atas, berikut ini akan dikemukakan pendapat dari Panitera Pengadilan Agama Kudus, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan para ulama di Kabupaten Kudus mengenai kedudukan anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang

---

<sup>116</sup> M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mualim, *Pengadilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cetakan II/ rvisi, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 106

kemudian melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam.

### **C.1. Pendapat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kudus**

Menurut pendapat beliau anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya kedudukannya adalah tetap anak sah laki-laki yang menikah dengan ibunya, karena laki-laki tersebut bersedia menikahi wanita yang sedang hamil bukan dari benihnya tersebut, maka resiko yang harus ditanggung oleh laki-laki tersebut adalah menerima anak yang dikandung oleh wanita hamil di luar nikah yang dinikahinya tersebut.

Pencatuman nama orang tua anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut nantinya apabila sudah dilahirkan dalam akta kelahiran dan surat-surat lainnya adalah tetap nama ayah (laki-laki yang menikah dengan ibunya), walaupun suami ibunya tersebut bukanlah ayah kandungnya, tetapi dia (anak tersebut) lahir setelah adanya perkawinan orang tuanya.<sup>117</sup>

### **C.2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

Menurut pendapat beliau, anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam kedudukannya ditentukan dari

---

<sup>117</sup> Abdul Wahid, Op. Cit, tanggal 20 Mei 2004

waktu kelahirannya. Apabila dia lahir lebih dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak sah dan dia memakai nama ayahnya (suami ibunya), tetapi kalau dia lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak tidak sah dan dia memakai nama ibunya.

Tetapi menurut pemerintah, pencantuman nama orang tua anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut nantinya apabila sudah dilahirkan dalam akta kelahiran dan surat-surat lainnya adalah tetap nama si ayah (suami ibunya), walaupun suami ibunya tersebut bukanlah ayah kandungnya, tetapi sewaktu dia (anak tersebut) lahir, surat nikah ibunya dan ayahnya (suami ibunya) yang menjadi pegangan karena surat nikah tersebut merupakan bukti otentik adanya perkawinan orang tuanya.<sup>118</sup>

### **C.3. Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kudus**

#### **a. Kyai H. Daenuri, BA**

Menurut pendapat beliau, anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam kedudukannya ditentukan atau dihitung dari waktu kelahiran bayi tersebut sejak dilaksanakannya perkawinan orang tuanya.

---

<sup>118</sup> Cholil AG, Op. Cit, tanggal 14 Mei 2004

- Apabila dia lahir lebih dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak sah dan dia memakai nama ayahnya (suami ibunya).
- Kalau dia lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak tidak sah dan dia memakai nama ibunya.

Tetapi menurut pemerintah, pencantuman nama orang tua anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut nantinya apabila sudah dilahirkan dalam akta kelahiran dan surat-surat lainnya adalah tetap nama suami ibunya, karena di dalam perkawinan, yang namanya anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ada sejak perkawinan, bukan sebelum perkawinan, meskipun janin tersebut sudah ada di dalam kandungan ibunya sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Apabila si anak tersebut adalah perempuan dan dia akan menikah maka ayahnya (suami ibunya) tersebut tidak dapat menjadi wali nikah karena anak tersebut telah ada dalam kandungan ibunya sebelum dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami



ibunya (ibunya telah hamil dulu bukan dengan laki-laki yang menikahnya). Untuk itu maka harus menggunakan wali hakim.<sup>119</sup>

**b. Kyai H. Masykuri**

Menurut pendapat beliau, anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam kedudukannya ditentukan atau dihitung dari waktu kelahiran bayi tersebut sejak dilaksanakannya perkawinan orang tuanya.

Apabila dia lahir lebih dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak sah dan dia memakai nama ayahnya (suami ibunya). Dan apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka ayahnya tersebut (suami ibunya) bisa dijadikan wali nikah.

Tetapi meskipun dia lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya kedudukannya adalah tetap anak sah karena dia dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dan dia memakai nama suami ibunya. Tetapi apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka ayahnya tersebut (suami ibunya) tidak bisa dijadikan wali nikah.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Daenuri, Op. Cit, tanggal 22 Mei 2004

<sup>120</sup> Masykuri, Op. Cit, tanggal 23 Mei 2004

**c. Hj. Chumaidah**

Menurut pendapat beliau, anak yang dikandung oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam kedudukannya ditentukan atau dihitung dari waktu kelahiran bayi tersebut sejak dilaksanakannya perkawinan orang tuanya.

- Apabila dia lahir lebih dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak sah dan dia memakai nama ayahnya (suami ibunya). Dan apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka suami ibunya tersebut bisa dijadikan wali nikah.
- Kalau dia lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya perkawinan antara ibunya dengan suami ibunya maka kedudukannya adalah anak tidak sah, dan dia memakai nama ibunya.<sup>121</sup>

Menurut pendapat penulis, petunjuk yang telah diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang sah atau tidaknya seorang anak sudah sangat jelas. Anak sah dalam Islam sebagaimana dinyatakan sebelumnya adalah anak yang lahir minimal 6 bulan setelah pernikahan ayah ibunya yang merupakan akibat pernikahan tersebut (QS Al-Luqman Ayat 14). Terhadap kedudukan anak yang

---

<sup>121</sup> Chumaidah, Op. Cit, tanggal 24 Mei 2004

dilahirkan oleh wanita hamil yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut pendapat penulis adalah :

- a. Apabila anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan dari perkawinan ibu kandung dan suami ibunya maka dia adalah tetap anak sah. Dan apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka suami ibunya tersebut bisa dijadikan wali nikah.
- b. Tetapi apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan dari perkawinan ibu kandung dan suami ibunya maka dia bukanlah anak sah. Dan apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka suami ibunya tersebut bisa dijadikan wali nikah.

#### **D. Masalah Yang Timbul Di Masyarakat Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Di Kabupaten Kudus Dan Peran Para Ulama Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Kudus Dalam Mengatasi Masalah Tersebut**

##### **D.1. Masalah Yang Timbul Di Masyarakat Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Bukan Dengan Laki-laki Yang Menghamilinya Di Kabupaten Kudus**

Kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari pergaulan yang salah yang dilakukan, yang diikuti dengan kurangnya pengawasan (kontrol) yang dilakukan oleh orang tua. Mengenai dasar-dasar agama yang sudah didapatkan sejak kecil tidak merupakan faktor yang terbukti sebagai

penyebab kehamilan di luar nikah. Setelah semuanya terjadi, yang ada hanyalah rasa penyesalan yang kini sudah tidak ada gunanya lagi.<sup>122</sup>

Perasaan berdosa kepada Allah SWT yang selalu menghinggap, perasaan bersalah kepada kedua orang tua karena sudah menghancurkan dan menyakiti hati dan perasaannya, perasaan malu kepada lingkungan masyarakatnya, perasaan bersalah kepada anak yang dikandungnya karena tidak dapat memastikan siapa sebenarnya ayah kandungnya si anak karena kebebasan pergaulan yang dilakukannya, adalah beberapa perasaan yang selalu melingkupi hati bagi wanita hamil di luar nikah, meskipun pada akhirnya dia tetap melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>123</sup>

Dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya ini maka pada akhirnya muncul atau timbul berbagai komentar dari masyarakat sekitarnya terhadap pasangan tersebut. Yang pasti pasangan tersebut akan menjadi bahan pembicaraan dan dicemooh oleh masyarakat disekelilingnya karena mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama maupun

---

<sup>122</sup> X, Wawancara, Wanita hamil yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, yang menjadi responden dan identitasnya tidak mau disebutkan, tanggal 28 Mei 2004

<sup>123</sup> Y, Wawancara, Wanita hamil yang melaksanakan perkawinan bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, yang menjadi responden dan identitasnya tidak mau disebutkan, tanggal 29 Mei 2004

norma-norma kesusilaan, sehingga pada akhirnya pasangan tersebut merasa terkucil di lingkungannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat yang menjadi responden, yang dalam lingkungannya terdapat wanita hamil, didapatkan hasil sebagaimana terlihat dalam tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Tanggapan masyarakat yang di lingkungannya terdapat**  
**wanita hamil di luar nikah**

Tanggapan Masyarakat	Jumlah	Prosentase
- Terganggu	9	90 %
- Tidak Terganggu	1	10 %
Jumlah	10	100 %

**Sumber data : hasil angket yang sudah diolah.**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang di lingkungannya terdapat wanita hamil mayoritas ( 9 orang atau 90 %) mengatakan merasa terganggu dengan adanya hal tersebut, sedangkan yang mengatakan tidak terganggu hanya 1 orang saja atau 1 %.

Menurut mereka, wanita yang hamil di luar nikah tersebut memang sudah seharusnya dinikahkan atau melaksanakan perkawinan,

karena kalau tidak maka akan semakin mencoreng nama baik lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi satu-satunya jalan keluar untuk menutupi aib tersebut adalah dengan dilaksanakannya perkawinan terhadap wanita hamil tersebut, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut adalah untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungannya apabila nanti dilahirkan agar mempunyai seorang ayah dan juga kedudukannya adalah sebagai anak sah karena dilahirkan setelah dilaksanakannya perkawinan ibunya, sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2**

**Tanggapan masyarakat terhadap dilaksanakannya perkawinan wanita hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya**

Tanggapan Masyarakat	Jumlah	Prosentase
- Harus dilaksanakan	10	100 %
- Tidak harus dilaksanakan	0	0 %
Jumlah	10	100 %

**Sumber data : hasil angket yang sudah diolah.**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh responden (10 orang atau 10 %) mengatakan perkawinan wanita hamil harus dilaksanakan

baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dengan adanya kejadian seperti ini seharusnya bisa dijadikan bahan pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Cukup sampai disini saja, jangan sampai terulang lagi.

## **D.2. Peran Para Ulama Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Kudus Dalam Mengatasi Masalah Tersebut**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kudus tentang hal-hal apa sajakah yang menyebabkan semakin banyak terjadinya wanita hamil di luar nikah, antara lain adalah :

1. Kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama
2. Kurangnya keimanan seseorang dilandasi dasar-dasar agama yang kuat
3. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks<sup>124</sup>
4. Pengaruh modernisasi dan kebudayaan asing yang masuk dengan bebas ke Indonesia
5. Pengaruh dari lingkungan luar yang tidak baik
6. Pengaruh dari pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali<sup>125</sup>
7. Kurangnya perhatian dari keluarga atau orang tua

---

<sup>124</sup> Daenuri, Op. Cit, tanggal 22 Mei 2004

<sup>125</sup> Masykuri, Op. Cit, tanggal 23 Mei 2004

8. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya.<sup>126</sup>

Dengan melihat tentang hal-hal yang menyebabkan semakin banyak terjadinya wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Kudus seperti tersebut di atas, maka menurut para ulama dan tokoh ulama di Kabupaten Kudus langkah-langkah yang harus diambil atau ditempuh untuk mengatasi atau menekan semaksimal mungkin agar terjadinya kasus kehamilan di luar nikah jumlah semakin sedikit, antara lain adalah :

1. Berusaha memberikan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama
2. Berusaha menumbuhkan keimanan seseorang dengan dilandasi dasar-dasar agama yang kuat
3. Berusaha memberikan pengetahuan tentang pendidikan seks, bahwa seks hanya boleh dilakukan setelah dilaksanakan pernikahan yang sah<sup>127</sup>
4. Berusaha memberikan pengertian bahwa modernisasi dan kebudayaan asing yang masuk dengan bebas ke Indonesia tidak untuk diterima apa adanya kemudian ditiru dan diikuti semuanya, tetapi perlu disaring terlebih dahulu dan dipilah-pilah mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Dengan begitu maka kita dapat membuang

---

<sup>126</sup> Chumaidah, Op. Cit, tanggal 24 Mei 2004

<sup>127</sup> Daenuri, Op. Cit, tanggal 22 Mei 2004



modernisasi dan pengaruh kebudayaan asing yang merugikan dan mengambil yang bermanfaat.

5. Berusaha mengarahkan agar anak tidak bergaul dalam lingkungan luar yang tidak baik karena hal tersebut lama kelamaan akan memberikan pengaruh yang tidak baik juga kepada diri anak
6. Berusaha memberikan pengetahuan tentang agama agar anak terhindar dari pengaruh pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali<sup>128</sup>
7. Berusaha memberikan pengertian kepada keluarga dan orang tua agar memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya, jangan sampai karena kesibukan pekerjaan dan urusan mereka sampai melupakan anak-anaknya
8. Berusaha memberikan pengertian kepada para orang tua agar memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergaulan anaknya, siapa teman-temannya, hal-hal apa sajakah yang mereka lakukan, tempat-tempat apa sajakah yang mereka kunjungi, dan memberikan batas waktu jam malam untuk mereka pulang ke rumah.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Masykuri, Op. Cit, tanggal 23 Mei 2004

<sup>129</sup> Chumaidah, Op. Cit, tanggal 24 Mei 2004

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam sebagaimana terjadi di Kabupaten Kudus sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat rukun-rukun nikah meskipun perbuatan zina yang sudah dilakukannya adalah perbuatan dosa. Setelah anak yang dikandungnya lahir tidak perlu dilakukan pengulangan nikah lagi karena ijab qobul hanya sekali saja dilakukan.
2. Kedudukan seorang anak dalam Islam sebagai anak sah apabila anak yang lahir minimal 6 bulan setelah pernikahan ayah dan ibunya yang merupakan akibat pernikahan tersebut. Ini merujuk saat terjadinya pembuahan janin sebagai titik awal kejadian anak, dan dia memakai nama ayahnya (suami ibunya). Dan apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka ayahnya tersebut (suami ibunya) bisa dijadikan wali nikah. Apabila kurang dari 6 bulan adalah tidak sah, dia memakai nama ibunya. Dan apabila si anak adalah perempuan dan akan menikah maka ayahnya tersebut (suami ibunya) tidak bisa dijadikan wali nikah.
3. Masalah yang timbul dalam masyarakat terhadap dilaksanakannya perkawinan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya adalah muncul atau timbulnya berbagai komentar dari masyarakat sekitarnya

terhadap pasangan tersebut. Yang pasti pasangan tersebut akan menjadi bahan pembicaraan dan dicemooh oleh masyarakat disekelilingnya karena mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama maupun norma-norma kesusilaan, sehingga pada akhirnya pasangan tersebut merasa terkucil di lingkungannya. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa mayoritas mereka merasa terganggu karena anggota masyarakatnya ada yang hamil di luar nikah.

Menurut mereka, wanita yang hamil di luar nikah tersebut memang sudah seharusnya dinikahkan atau melaksanakan perkawinan, karena kalau tidak maka akan semakin mencoreng nama baik lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi satu-satunya jalan keluar untuk menutupi aib tersebut adalah dengan dilaksanakannya perkawinan terhadap wanita hamil tersebut, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut adalah untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungannya apabila nanti dilahirkan agar mempunyai seorang ayah dan juga kedudukannya adalah sebagai anak sah karena dilahirkan setelah dilaksanakannya perkawinan ibunya.

## **B. SARAN**

1. Keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Hukum Islam yang terjadi di Kabupaten Kudus adalah sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat rukun-

rukun nikah dan setelah anak yang dikandungnya lahir tidak perlu dilakukan pengulangan nikah lagi karena ijab qobul hanya sekali saja dilakukan. Meskipun begitu, tidak berarti ada pembenaran terhadap hal tersebut, karena bagaimanapun juga perbuatan zina yang sudah dilakukannya adalah perbuatan dosa dan tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sudah selayaknya mereka bertobat memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

2. Kedudukan anak yang dikandung oleh wanita hamil di luar nikah yang melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah apabila dilahirkan minimal 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya, apabila kurang dari 6 bulan adalah tidak sah. Tegasnya, anak sah adalah anak yang terlahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan sudah ditetapkannya patokan tersebut maka penentuan kedudukan anak yang dilahirkan oleh wanita hamil harus berpedoman pada patokan tersebut.

Penentuan kedudukan anak tersebut harus dilaksanakan dengan benar karena akan berpengaruh terhadap pencatuman nama orang tua anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut nantinya apabila sudah dilahirkan dalam akta kelahiran dan surat-surat lainnya, serta siapa wali nikahnya apabila anak tersebut perempuan dan akan melangsungkan pernikahan.

3. Peran para ulama dan tokoh masyarakat dalam menekan semakin banyak terjadinya perkawinan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamilinya harus semakin ditingkatkan. Langkah-langkah yang harus

mereka ambil atau ditempuh untuk mengatasi atau menekan semaksimal mungkin agar terjadinya kasus kehamilan di luar nikah jumlahnya semakin sedikit terjadi di Kabupaten Kudus antara lain adalah :

- a. Berusaha memberikan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama
- b. Berusaha menumbuhkan keimanan seseorang dengan dilandasi dasar-dasar agama yang kuat
- c. Berusaha memberikan pengetahuan tentang pendidikan seks, bahwa seks hanya boleh dilakukan setelah dilaksanakan pernikahan yang sah
- d. Berusaha memberikan pengertian bahwa modernisasi dan kebudayaan asing yang masuk dengan bebas ke Indonesia tidak untuk diterima apa adanya kemudian ditiru dan diikuti semuanya, tetapi perlu disaring terlebih dahulu dan dipilah-pilah mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Dengan begitu maka kita dapat membuang modernisasi dan pengaruh kebudayaan asing yang merugikan dan mengambil yang bermanfaat.
- e. Berusaha mengarahkan agar anak tidak bergaul dalam lingkungan luar yang tidak baik karena hal tersebut lama kelamaan akan memberikan pengaruh yang tidak baik juga kepada diri anak
- f. Berusaha memberikan pengetahuan tentang agama agar anak terhindar dari pengaruh pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali

- g. Berusaha memberikan pengertian kepada keluarga dan orang tua agar memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya, jangan sampai karena kesibukan pekerjaan dan urusan mereka sampai melupakan anak-anaknya
- h. Berusaha memberikan pengertian kepada para orang tua agar memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergaulan anaknya, siapa teman-temannya, hal-hal apa sajakah yang mereka lakukan, tempat-tempat apa sajakah yang mereka kunjungi, dan memberikan batas waktu jam malam untuk mereka pulang ke rumah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Abddurrouef, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
- Al-Qurthubi, *Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Dar al-Kutub, Kairo, 1965.
- Ali, Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Majalah Mimbar Hukum Nomor 9 Tahun IV, Jakarta, 1992.
- ....., *Agama Islam Di Indonesia*, Catatan Kuliah, Program Pasca Sarjana Univesitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- A. Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Ash Shidieqi, Hasbi, *Al-Islam, Cetakan III*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- ....., *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1982.
- B, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kudus Dalam Angka*, Kudus, 2002.
- ....., *Sekilas Statistik Kabupaten Kudus*, Kudus, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ajaran Islam Tentang Sex Education, Hidup Perkawinan, dan Pendidikan Anak*, Al-Ma'arif, bandung, 1987.

....., *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Dahlan, M. Sujari, *Fenomena Nikah Sirri, Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita IV/ Tahun II/ 1985/ 1986, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.

Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, terjemahan Alwiyah Abdurrahman, Cetakan II, Al-Bayan, Bandung, 1987.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam tentang NTCR I*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

....., *Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1995/ 1996.

Djaja, Tamar, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980.

Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya dalam Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam*



*Kontemporer, Buku I, Cetakan III*, Pustaka Firdaus-Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Hamidy, Mu'ammul, *Perkawinan Dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mualim, *Pengadilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cetakan II/ rvisi, UII Press, Yogyakarta, 1999.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta, 1961.

....., *Hadist Kewarisan Dan Sistem Bilateral*, Tinta Mas, Jakarta, 1967.

....., *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, 1974.

Husain, Abrur Razak, *Hak Anak Dalam Islam*, terjemahan Azwir Buton, Cetakan I, Fikahati Anesta, Jakarta, 1992.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, 1971.

Kelib, Abdullah, *Beberapa Catatan Efektifitas Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Nomor 9, FH UNDIP, Semarang, 1992.

Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974.

Ma'luf, Hassanain Muhammad, *Al-Mawarits Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (t.tp.: Matba'ah Al-Madani, 1976.

Masdar, Helmy, *Islam dan Keluarga Berencana*, Cetakan Ke-2, Thoha Saputra, Semarang, 1969.

Muslehuddin, Mohammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientasi Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam (Philosophy Of Islamic Law And The Orientalist A Comparative Study Of Islamic Legal System)*, terjemahan Wahyudi Asmin, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

- Rokhimiyati, Jihad, *Tinjauan Tentang Prosedur Perkawinan di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dengan Dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam*, UNDIP, Semarang, 1994.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1968.
- ....., *Asas-asas Hukum Islam*, Widjaja, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- ....., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 1982.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah Dan Syari'ah Islam (Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah)*, terjemahan Fachruddin HS, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Thalib, Sayuti, *Receptio In Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario*,

*Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1981.

....., *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Press,

Jakarta, 1992.

Tim Yayasan Kakak, *Anak-anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang*

*Tercampakkan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Yunanto, *Pranata Perkawinan Dalam Masyarakat Yang Pluralistik*, Majalah Masalah-

*masalah Hukum*, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Semarang, 1997.

....., *Keberadaan Lembaga Pengesahan Perkawinan*, Majalah Masalah-masalah

*Hukum* Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

1993.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al- Hidayah, Jakarta, 1964.

....., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta,

1981.

#### **Perundang-undangan :**

Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.